

LAPORAN KINERJA ESELON III
SEKRETARIAT DINAS
Tribulan II

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Pembentukan Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2022 tentang kedudukan susunan organisasi, uraian tugas, fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata, menjabarkan bahwa Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat.

B. Uraian Tugas dan Fungsi

Sekretariat merupakan salah satu unsur kesekretariatan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan SOTK dan penjabaran tugas, pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang. Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
3. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
4. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
5. Pengelolaan urusan rumah tangga;
6. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
7. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
8. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem pengendalian internal;

9. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;
10. Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana aparatur;
11. Pengelolaan barang milik daerah;
12. Pelaksanaan koordinasi penyelenggara tugas-tugas bidang;
13. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
14. Pemberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Struktur Organisasi Sekretariat Dinas Pariwisata terdiri dari:

1. Kasubag Umum dan Kepegawaian (Diah Triana Wijayanti, S.Pd);
2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda (Chatarina Nito Rutiske, S.IP);
3. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Maria Ulfa, S.Pd.SD)

Sekretariat mempunyai peran penting dalam mendukung keberhasilan sasaran strategis pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang serta dalam mengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi beserta pencapaiannya Pemerintah (SAKIP).

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani Sekretaris dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 1 (satu) target kinerja dengan 1 (satu) sasaran program, yaitu:

1. Terselenggaranya Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran

B. Capaian Kinerja

Berikut ringkasan atas capaian target kinerja hingga Tribulan I Tahun 2025

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Individu
Tribulan II Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Terselenggaranya Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%	44,69%	44,69%

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki target sebesar 100% sampai dengan Tribulan II Tahun 2025 terealisasi sebesar 44,69%. Maka dalam hal ini kategori capaian kinerja **Berhasil** dengan rata-rata capaian sebesar 44,69 %.

Tabel 2.2 Cost Per Outcome Sekretariat
Tribulan II Tahun 2025

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Anggaran			Realisasi			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	%	T	R	%	
1.	Terselenggaranya Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran				100 %	44,69 %	44,69	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		4 315 288 290	1 928 586 812	44,69			44,69	

C. Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Atas capaian target kinerja masing-masing indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM

Terselenggaranya Fasilitasi Kebutuhan Operasional Kantor

Dalam Rangka mendorong pelaksanaan penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata. Tugas pokok yang dilakukan pada sekretariat Dinas Pariwisata adalah merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Dinas. Terselenggaranya fasilitasi kantor sangat berpengaruh terhadap produktivitas karyawan dan peningkatan pelayanan. Fasilitas kantor adalah segala sesuatu yang dinikmati, dipakai, ditempati, dan dimanfaatkan oleh karyawan, baik yang berkaitan dengan pekerjaan maupun menunjang kelancaran proses bekerja.

Kegiatan operasional perkantoran dapat dilaksanakan dengan optimal jika didukung oleh administrasi dan berbagai kegiatan perkantoran lainnya. Hal tersebut mensiratkan betapa pentingnya pengetahuan yang berkenaan dengan administrasi dan operasional perkantoran, terutama berkenaan dengan profesionalisme, efektivitas, serta efisiensi dalam kegiatan administrasi perkantoran. Sekretariat dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan berbagai bentuk bimbingan baik yang bersifat kolektif maupun yang bersifat khusus (sesuai permintaan). Dengan anggaran Rp. 4.315.286.290 dan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 1.928.586.812 dengan capaian 44,69%. Berikut adalah uraian capaian dari masing-masing indikator, sebagai berikut:

2.1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perkantoran.

Administrasi perkantoran merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan sistem administrasi dalam sebuah ruang lingkup kantor. Sistem manajemen dalam sebuah ruang lingkup perkantoran ini salah satu bagian dari manajemen yang memberikan informasi sesuai dengan bidang administrasi yang dibutuhkan untuk menunjang berjalannya suatu kegiatan secara efektif. Berikut capaian kinerja jika dianalisis dari:

1. Perjanjian Kinerja

Berikut dibawah ini dapat dilihat **Tabel 2.3** mengenai realisasi Tribulan II tahun 2025 Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=(4/3))
Terselenggaranya Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%	44,69%	44,69%

Dari **Tabel 2.3** didapatkan hasil berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Dinas Pariwisata Tahun 2025 memiliki target sebesar **100%** sampai dengan Tribulan II sudah terealisasi sebesar **44,69%** Maka dalam hal ini kategori capaian kinerja **Berhasil**.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi Kinerja pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada **Tabel 2.4** dibawah ini:

Tabel 2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja s d Tribulan I Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025 Tribulan II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terselenggaranya Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%	95,88%	97,15%	44,69%

Berdasarkan **Tabel 2.4** menunjukkan bahwa capaian realisasi sasaran program Meningkatnya Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perkantoran dari Tahun 2023 sebesar 95,88% meningkat pada tahun 2024 sebesar 97,15%. Pada tahun 2025 sampai dengan Tribulan II realisasi kinerja sebesar 44,69%. Diharapkan untuk realisasi kinerja tahun 2025 dapat terealisasi dengan baik sampai dengan akhir Tribulan IV.

3. Perencanaan Strategis

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra disajikan pada **Tabel 2.5** dibawah ini:

Tabel 2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan (5=4/3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Terselenggaranya Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%	44,69 %	44,69 %

Berdasarkan Tabel 2.5 menunjukkan bahwa Perencanaan Strategis Sekretariat Dinas Pariwisata memiliki target sebesar 100% dan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 terealisasi sebesar 44,69%. Maka dalam hal ini kategori capaian kinerja **sangat berhasil**.

D. Rencana Tindak Lanjut.

Tindak lanjut dan upaya dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, diperlukan kesadaran tentang penerapan sistem perencanaan hingga pelaporan yang sistematis sebagai bentuk upaya pertanggungjawaban dari tupoksi beserta pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja, sehingga dapat terselenggaranya pemerintahan yang bersih, terarah, efektif dan efisien. Untuk itu perlu adanya upaya – upaya secara terus menerus dan berkelanjutan sebagai berikut :

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung termasuk menginformasikan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga didapatkan solusi.
2. Aktif berkoordinasi dengan OPD terkait usulan program/kegiatan/sub kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

E. Tanggapan Atasan Langsung.

- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja tribulan II (Dua) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretaris kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan pada tahun berikutnya.

Faktor pendukung keberhasilan pada Laporan Kinerja Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Tribulan II (Dua) Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

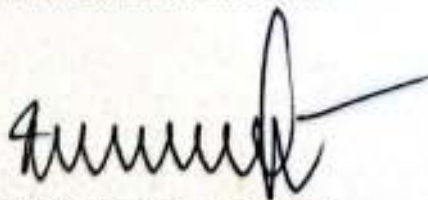
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2022, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan dari 1 target yang ditetapkan dengan 1 (satu) sasaran program Tribulan II (Dua) sudah berhasil diwujudkan dengan baik.

Demikian LKj Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang ini disusun dan dapat digunakan sebagai alat ukur untuk evaluasi diri dan perbaikan terhadap capaian pelaksanaan tugas serta pertanggungjawaban kepada pimpinan. Selain itu dapat pula digunakan sebagai alat pengambil keputusan bagi pihak terkait mengenai perencanaan di periode berikutnya.

Lumajang, 3 Juli 2025

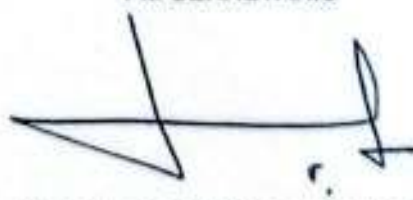
Mengetahui,
Atasan Langsung

KEPALA DINAS PARIWISATA



YULI HARISMA WATI, SP., M. Ling
NIP. 19690703 199602 2 002

PII. SEKRETARIS



LUQMAN AFIFUDIN, S.KM, M.P.H
NIP. 19810516 200604 1 014

LAPORAN KINERJA
JABATAN ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Tribulan II

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
3. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
4. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Sekretaris dengan Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 1 (satu) target kinerja dengan 1 (satu) sasaran kegiatan dan 5 sub kegiatan, yaitu:

1. Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 1.2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 1.3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Capaian Kinerja

Berikut ringkasan atas capaian target kinerja hingga Tribulan II Tahun 2025 :

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Individu
Tribulan II Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 4/3)	(6)
1. Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	38	38%	
	1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 dokumen	1 dokumen	50%	

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 4/3)	(6)
	Daerah				
	1.2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	
	1.3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	1 dokumen	50%	
	1.4 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	2 laporan	40%	
	1.5 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	6 laporan	50%	

**Tabel 2.2 Cost Per Outcome Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Tribulan II Tahun 2025**

No	Sasaran / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu (4)	Realisasi (5)	% (6)	T (7)	R (8)	% (9)	
(1)	(2)	(3)							(10)
1.	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Persentase fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				100%	38	38%	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		1.1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2	1	50%	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		1.1.2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1	1	100%	
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
		1.1.3 Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD				2	1	50%	

		dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPAD							
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		1.1.4 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5	2	40%	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		1.1.5 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12	6	50%	

C. Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Atas capaian target kinerja masing-masing indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN

A. Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, sub Bagian penyusunan program dan pelaporan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan sesuai dengan tujuan atas program dan kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berikut adalah uraian capaian dari masing-masing indikator, sebagai berikut.

A.1 Persentase fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata merupakan dokumen evaluasi yang akan dijadikan pedoman dalam perbaikan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Lumajang, sehingga dalam pengembangan kepariwisataan dapat *sustainable*.

A.1.1 Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditanda tangani antara Sekretaris Dinas dengan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 1 target sasaran kegiatan dengan 5 sub kegiatan, yaitu :

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja s/d Tribulan II Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1.Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran,	1.Persentase fasilitasi Dokumen Perencanaan,	100%	77	77%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			
	1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	1 dokumen	50%
	1.2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	1 dokumen	50%
	1.4 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	2 laporan	40%
	1.5 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	6 laporan	50%

Dari Tabel 2.3 didapatkan hasil berdasarkan Perjanjian Kinerja tersebut memiliki target sebesar 100% sampai dengan Tribulan II terealisasi sebesar 77% Maka dalam hal ini kategori capaian kinerja **Berhasil**.

Berdasarkan Rencana Aksi memiliki target sebesar **50%** dan realisasi sebesar **77%** maka dalam hal ini kategori capaian kinerja **Berhasil**. Untuk pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan time schedule.

D. Tanggapan Atasan Langsung.

- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

.....

.....

.....

.....

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada
Tribulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2022, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan dari 1 sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan 5 (lima) sub kegiatan hingga Tribulan II (dua) sudah berhasil diwujudkan dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung

Plt. SEKRETARIS DINAS


LUQMAN AFIFUDIN, S.KM, M.P.H
NIP. 19810516 200604 1 014

Lumajang, 3 Juli 2025

**ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN**


MARIA ULFA S.Pd.SD
NIP. 19830101 201406 2 003

**LAPORAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM
Tribulan II**

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja jabatan fungsional umum Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Pengadministrasian Perencanaan dan Program pada Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Perencanaan dan Program dengan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 3 (tiga) target kinerja dengan 1 (satu) sasaran kegiatan Meningkatnya ketersediaan dokumen SAKIP, yaitu:

1. Jumlah Dokumen RKA Sekretariat yang disusun;
2. Jumlah Dokumen RAK Sekretariat yang disusun;
3. Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sound System;

2.2. Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan hingga tribulan II tahun 2025:

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja
Tribulan II Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Meningkatnya ketersediaan dokumen SAKIP	1. Jumlah Dokumen RKA Sekretariat yang disusun	4 Berkas	2 Berkas	50 %	
	2. Jumlah Dokumen RAK Sekretariat yang disusun	4 Dokumen	2 Dokumen	50 %	
	3. Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sound System	4 kali	2 kali	50 %	

2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Jabatan Pengadministrasian Perencanaan dan Program pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam pencapaian sasaran dan target yang diperjanjikan tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Pt. SEKRETARIS DINAS



LUQMAN AFIFUDIN, S.KM, M.P.H
NIP. 19810516 200604 1 014

Lumajang, 02 Juli 2025

Tenaga Kerja Bulanan pada Sekretariat



MUCHLIS HUDA

**LAPORAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM
Tribulan II**

BAB I PENDAHULUAN

Peranggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja jabatan fungsional umum Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Pengadministrasian Perencanaan dan Program pada Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Perencanaan dan Program dengan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 6 (enamh) target kinerja dengan 1 (satu) sasaran kegiatan Meningkatkan ketersediaan dokumen SAKIP, yaitu:

1. Jumlah dokumen RKA yang disusun;
2. Jumlah dokumen Anggaran Kas yang disusun;
3. Jumlah Dokumen RKA Pergeseran yang disusun;
4. Jumlah Dokumen Anggaran Kas Pergeseran yang disusun;
5. Jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun;
6. Jumlah dokumen Anggaran Kas Perubahan yang disusun;

2.2. Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan hingga tribulan II tahun 2025:

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja
Tribulan II Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Meningkatnya ketersediaan dokumen SAKIP	1. Jumlah dokumen RKA yang disusun	4 Dokumen	0 Dokumen	0 %	
	2. Jumlah dokumen Anggaran Kas yang disusun	4 Dokumen	0 Dokumen	0 %	
	3. Jumlah Dokumen RKA Pergeseran yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	
	4. Jumlah Dokumen Anggaran Kas Pergeseran yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	
	5. Jumlah dokumen RKA perubahan yang disusun	4 Dokumen	2 Dokumen	50 %	
	6. Jumlah dokumen Anggaran Kas perubahan yang disusun	4 Dokumen	0 Dokumen	0 %	

2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain
-

Laporan Kinerja Jabatan Fungsional Umum
Subbag Sungram dan Pelaporan

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Jabatan Pengadministrasian Perencanaan dan Program pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam pencapaian sasaran dan target yang diperjanjikan tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

RII. SEKRETARIS DINAS



LUQMAN AFIFUDIN, SKM, M.PH
NIP. 19810516 200604 1 014

Lumajang, 2 Juli 2025

Tenaga Kerja Bulanan pada Sekretariat



M. SUKRON FUAD P.A

**LAPORAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM
Tribulan II**

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja jabatan fungsional umum Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Pengadministrasian Perencanaan dan Program pada Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Perencanaan dan Program dengan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 4 (empat) target kinerja dengan 1 (satu) sasaran kegiatan Meningkatnya ketersediaan dokumen SAKIP, yaitu:

1. Jumlah Dokumen LKJ Tribulanan Dinas Pariwisata;
2. Jumlah Dokumen Renja Dinas Pariwisata;
3. Jumlah LKJ Sekretariat yang dikoordinir dan disusun;
4. Jumlah Dokumen yang di scan dan diupload.

2.2. Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan hingga tribulan II tahun 2025:

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja
Tribulan II Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Meningkatnya ketersediaan dokumen SAKIP	1. Jumlah dokumen LKJ Tribulanan Dinas Pariwisata 2023	4 Dokumen	2 Dokumen	50 %	50 %
	2. Jumlah Dokumen Renja Dinas Pariwisata Tahun 2023	2 Dokumen	1 Dokumen	50 %	50 %
	3. Jumlah LKJ Sekretariat yang dikoordinir dan disusun	4 Dokumen	2 Dokumen	50 %	50 %
	4. Jumlah Dokumen yang di scan dan diupload	20 Dokumen	10 Dokumen	50 %	50 %

2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Jabatan Fungsional Umum
Subbag Sungram dan Pelaporan

Laporan Kinerja Jabatan Pengadministrasian Perencanaan dan Program pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam pencapaian sasaran dan target yang diperjanjikan tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Plt. Sekretaris Dinas



LUQMAN AFIFUDIN, S.KM, M.P.H
NIP. 19810516 200604 1 014

Lumajang, 02 Juli 2025

Tenaga Kerja Bulanan pada Sekretariat



MOCH. ERFAN JAUHARI

Laporan Kinerja Jabatan Fungsional Umum
Subbag Sengram dan Pelaporan

LAPORAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
Tribulan II TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.

Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah termasuk dalam rumpun akuntan dan anggaran yang mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah serta melaksanakan fungsi fungsi yang dulunya diampu oleh Subbag Keuangan.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Sekretaris dengan Jabfung Analais Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 1(satu) target kinerja dengan 1 (satu) sasaran kegiatan dan 5 sub kegiatan, yaitu:

1. Tercukupinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1.1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 1.5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2.2. Capaian Kinerja

Berikut ringkasan atas capaian target kinerja hingga Tribulan II Tahun 2025:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Individu
Tribulan II Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/5	6
1. Terpenuhiya administrasi keuangan perangkat daerah	Prosentase fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah				
	1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	24 orang/bulan	22 orang/bulan	92 %	Jumlah PNS yang diajukan gajinya sebanyak 22 orang karena ada PNS yang pension per April dan Juni 2025
	2. Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	12 dokumen	6 dokumen	50 %	Sesuai schedul
	3. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	6 Laporan	50 %	Sesuai schedul
	4. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Akuntansi SKPD	12 dokumen	6 Dokumen	50 %	Sesuai schedul
	5. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1 laporan	100 %	Sesuai schedule

Tabel 2.2
Cost Per Outcome Jabfung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
Tribulan II Tahun 2025

No	Sasaran / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	%	T	R	%	
1.	Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.820.160.271	1.379.329.960	49 %	24 orang/bulan	22 orang/bulan	92 %	
		1.1.1 Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN							
	1.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN		25.326.000	16.184.000	64 %	12 dokumen	6 dokumen	50 %	
		1.1.2 Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN							
	1.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD		4.361.000	1.756.000	40 %	12 dokumen	6 dokumen	50%	
		1.1.3 Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD							
	1.4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		350.000	0	0 %	12 dokumen	6 dokumen	50 %	
		1.1.4 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Akuntansi SKPD							
	1.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2.740.000	2.740.000	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	
		1.1.5 Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan laporan Keuangan Akhir tahun SKPD							

2.3.Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Atas capaian target kinerja masing-masing indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN A. Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dalam rangka mendorong Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, baik dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Jabfung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan sesuai dengan tujuan atas program dan kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berikut adalah uraian capaian dari masing-masing indikator, sebagai berikut:

A.1. Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah merupakan dokumen dokumen yang diperlukan untuk menggambarkan secara umum pelaksanaan proses keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang. Mulai dari dokumen untuk administrasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dokumen administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi, Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD maupun dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

A.1.1 Perjanjian Kinerja

Capaian indikator ini jika dianalisis dari perjanjian kinerja (PK) Tahun 2025 dengan target 100% dan pada Tribulan II (dua) sudah terealisasi sebanyak 68 %, sudah terealisasi anggaran sebesar Rp 1.400.009.960,- dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.852.937.271,- Berikut dibawah ini dapat dilihat beberapa dokumen Tribulan II Tahun 2025.

Tabel A.II.
Pencapaian Kinerja
Sd Tribulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=(4/3*100))
Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	68 %	68 %

2.4. Rencana Tindak Lanjut.

Secara umum target kinerja Jabfung Analis Keuangan Pusat dan Daerah bisa terlaksana sesuai schedule yang ditetapkan meskipun dengan support anggaran yang minim.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung.

- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

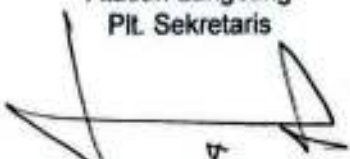
BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Jabfung Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Tribulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Analis Keuangan Pusat dan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2022, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan dari 1 target yang ditetapkan dengan 1 (satu) sasaran strategis hingga tribulan I (satu) sudah berhasil diwujudkan dengan baik.

Mengetahui,

Atasan Langsung
Plt. Sekretaris



LUQMANAFIFUDIN, S.KM, M.P.H
NIP. 19810516 200604 1 014

Lumajang, 3 Juli 2025

Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Ahli Muda



CHATARINA NITO RUTISKE, S.IP
NIP. 19780718 200903 2 005

LAPORAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM TRIBUNAL II TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja jabatan Bendahara pada Sekretariat. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah dan tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, transparan dan tanggungjawab

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Keputusan Bupati Lumajang Nomor :188.45/677/427.12/2022 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang dimaksud Bendahara Pengeluaran terdapat 7 (tujuh) point sasaran kegiatan yaitu Meningkatkan Ketertiban dan Ketersediaan , yaitu:

1. Pengajuan Permintaan Pembayaran menggunakan ; SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS dan SPP-TU.
2. Menerima dan menyimpan uang persediaan, ganti uang persediaan dan tambahan uang persediaan.
3. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan, ganti uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang dikelola.
4. Menolak perintah bayar dari pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.
6. Membuat laporan pertanggung jawaban, secara adminitratif kepada pengguna anggaran dan laporan pertanggung jawaban

secara fungsional kepada bendahara umum daerah secara periodik.

7. Menungut dan menyetor pajak sesuai peraturan dan ketentuan perundang undangan.

2.2. Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan tribulan I tahun 2025 :

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja
Tribulan II Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 3/4	6
1. Tersedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	24 org / 12 bulan	23 org/ 6 bulan	50%	Tribulan II
2. Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	Tribulan II

2.3. ANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

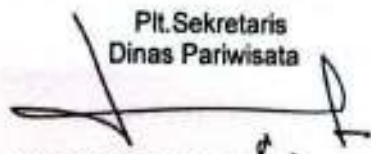
- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

.....

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Bendahara Pengeluaran pada Bidang Sekretaris Dinas Pariwisata Tribulan II (ke dua) Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam pencapaian sasaran dan target yang diperjanjikan tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Mengetahui,

Plt. Sekretaris
Dinas Pariwisata

LUQMAN AFIFUDIN S.KM.MPH
NIP. 19810516200641014

Lumajang, 2 Juli 2025
Penelaah Teknis Kebijakan


VIEN NURFINANI S.AP
NIP.1979061820080102016

**LAPORAN KINERJA ESELON IV
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Tribulan II**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian merupakan salah satu subbag pada Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- c. Melaksanakan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang inventaris;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat, pengarsipan dan keprotokolan;
- e. Melaksanakan urusan kebersihan ketertiban dan keamanan;
- f. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKB) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPB);
- g. Melaksanakan pentasahaan barang milik daerah;
- h. Melaksanakan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana;
- i. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- j. Melaksanakan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Sekretaris

Struktur Organisasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata terdiri dari:

1. Pengadministrasi Umum
2. Pengadministrasi Persuratan
3. Pramu Bakti

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai peran penting dalam mendukung keberhasilan sasaran strategis pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang serta dalam mengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi beserta pencapaiannya Pemerintah (SAKIP).

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Sekretaris dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 16 (enam belas) indikator kinerja dengan 7 (tujuh) sasaran kegiatan, yaitu:

1. Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
2. Terpenuhinya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
3. Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.2. Capaian Kinerja

Berikut ringkasan atas capaian target kinerja hingga Tribulan II Tahun 2025 setelah perubahan:

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama
Tribulan II Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/5	6
1. Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100	0,50	50	
	1. Jumlah Rencana Kebutuhan BMD pada PD	2 Dokumen	1	50	
	2. Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1	50	

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/5	6
2. Terpenuhiya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	100	0,50	50	
	1. Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	6	50	
3. Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	0,60	60	
	1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	3	60	
4. Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	0,6667	66,67	6 jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran ada: 1 jenis yang sifatnya rutin dilaksanakan setiap bulan yaitu honorarium, dan 2 jenis pemeliharaan, sarana kantor, perangkat, materai dan belanja benda pos
	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11	100	
	2. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	1	33,33	
	3. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1	50	
	4. Jumlah Paket Bahan/ Materai yang Disediakan	2 Paket	1	50	
	5. Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	6	50	
	6. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	3 Laporan	2	66,67	
5. Terpenuhiya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Pengadaan Barang Milik Daerah	100	0	0	
	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	14 Unit	0	0	

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/5	6
	2. Jumlah Unit Alat Rumag Tangga Lainnya (Home Use)	5 Unit	0	0	
6. Terpenuhiya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	0,50	50	
	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6	50	
	2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6	50	
7. Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	0,2909	29,09	Jenis pemeliharaan yang sifatnya rutin yaitu: pemeliharaan rutin sarana dan prasarana aparatur
	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	10	29,41	
	2. Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit	0	0	
	3. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	6	30	

Tabel 2.2.1
Cost Per Outcome Subag. Umum dan Kepegawaian
Tribulan II Tahun 2025

Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja						Efisi- ensi
		Pagu	Realisasi	%	T	R	%	
1. Terpenuhiya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Persentase Fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	700.000	0	0	4	2	50	100

daerah	1. Jumlah Rancana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	350.000	0	0	2 Dokumen	1	50	100
	2. Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD SKPD	350.000	0	0	2 Laporan	1	50	0
2. Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	350.000	0	0	12 Dokumen	6	50	100
	1. Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	350.000	0	0	12 Dokumen	6	50	100
3. Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.100.000	0	0	5 Dokumen	3	60	100
	1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.100.000	0	0	5 Dokumen	3	60	100
4. Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.107.539,50	27.556.617	28,67	33	22	66,67	71,33
	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	0	0	0	11 Paket	11	0	

	2. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15.603.592,50	500.000	3,20	3 Paket	1	33,33	96,80
	3. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8.953.947	1.000.000	11,17	2 Paket	1	50	88,83
	4. Jumlah Paket Bahan/ Materai yang Disediakan	1.600.000	50.000	3,13	2 Paket	1	50	96,87
	5. Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.200.000	0	0	12 Laporan	6	50	100
	6. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	68.750.000	28.006.617	40,74	3 Laporan	2	66,67	59,26
	5. Meningkatkan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.490.570	0	0	19 Unit	0	0	100
	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	4.126.980	0	0	14 Unit	0	0	100
	2. Jumlah Unit Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	57.363.590	0	0	5 Unit	0	0	100
6. Meningkatkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.155.597.000	450.222.435	38,96	24 Laporan	12	50	61,04

	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	385.800.000	143.208.541	37,12	12 Laporan	6	50	62,88
	2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	769.797.000	307.013.894	39,88	12 Laporan	6	50	60,12
7. Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.969.500	47.832.300	25,18	55 Unit	16	29,09	74,82
	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	143.789.500	40.182.300	27,95	34 Unit	10	29,41	72,05
	2. Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	17.280.000	0	0	1 Unit	0	0	100
	3. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28.900.000	7.650.000	26,47	20 Unit	6	30	73,53

2.3. Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Atas capaian target kinerja masing-masing indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN

A. Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Barang milik daerah (BMD) merupakan sarana dan prasarana yang dapat dipakai sebagai alat atau penunjang dan pendukung dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Berikut adalah uraian capaian dari masing-masing indikator, sebagai berikut:

A.1. Persentase Fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah.

Berikut capaian kinerja jika dianalisis dari:

A.1.1 Perjanjian Kinerja

Capaian indikator ini jika dianalisis dari Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 dengan target 4 dokumen dan selama tribulan II (dua) sudah terealisasi atau dengan capaian 50%, sedangkan realisasi anggaran hingga Tr. II sebesar Rp. 0,- dengan pagu anggaran Rp. 700.000,- atau dengan capaian 0%, maka dalam hal ini kategori capaian kinerja sudah berhasil. Kegiatan akan dilaksanakan pada tribulan berikutnya. Berikut dibawah ini dapat dilihat realisasi hingga tribulan II (dua) tahun 2025:

Tabel A.I.I.
Pencapaian Kinerja
Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	0,50	50%

Capaian kinerja dan penyerapan anggaran untuk kegiatan Fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah hingga tribulan II diantaranya yaitu:

1. Belanja barang pakai habis

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - Bahan cetak belum terlaksana dengan anggaran sebesar Rp 350.000,-

2. Belanja barang pakai habis

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - Bahan cetak belum terlaksana dengan anggaran sebesar Rp 350.000,-

SASARAN KEGIATAN
B. Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah. Berikut adalah uraian capaian dari masing-masing indikator, sebagai berikut:

B.1. Persentase Fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.

Berikut capaian kinerja jika dianalisis dari:

B.1.1. Perjanjian Kinerja

Capaian indikator ini jika dianalisis dari perjanjian kinerja (PK) Tahun 2025 dengan target 12 dokumen dan selama tribulan II (dua) sudah terealisasi atau dengan capaian 50%, sedangkan realisasi anggaran selama Tr. II sebesar Rp 0,- dengan pagu anggaran Rp 350.000,- atau dengan capaian 0%, maka dalam hal ini kategori capaian kinerja sudah berhasil. Kegiatan akan dilaksanakan pada tribulan berikutnya. Berikut dibawah ini dapat dilihat realisasi selama tribulan II (dua) Tahun 2025:

Tabel B.I.I.
Pencapaian Kinerja
Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	0.50	50

Capaian kinerja dan penyerapan anggaran untuk kegiatan Fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah hingga tribulan II diantaranya yaitu:

1. Belanja barang pake habis

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - Bahan cetak belum terlaksana dengan anggaran sebesar Rp 350.000,-

SASARAN KEGIATAN
C. Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi kepegawaian merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan sistem kepegawaian dalam sebuah ruang lingkup kantor. Sistem manajemen dalam sebuah ruang lingkup perkantoran ini salah satu bagian dari manajemen yang memberikan informasi sesuai dengan bidang kepegawaian yang dibutuhkan untuk menunjang berjalannya suatu kegiatan secara efektif. Berikut adalah uraian capaian dari masing-masing indikator, sebagai berikut:

C.1. Persentase Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Berikut capaian kinerja jika dianalisis dari:

C.1.1. Perjanjian Kinerja

Capaian indikator ini jika dianalisis dari perjanjian kinerja (PK) Tahun 2025 dengan target 5 dokumen dan selama tribulan II (dua) belum terealisasi atau dengan capaian 60%, sedangkan realisasi anggaran selama Tr. II sebesar Rp 0,- dengan pagu anggaran Rp 1.1000.000,- atau dengan capaian 0%, maka dalam hal ini kategori capaian kinerja sudah berhasil. Kegiatan akan dilaksanakan pada tribulan berikutnya. Berikut dibawah ini dapat dilihat realisasi selama tribulan II (dua) Tahun 2025:

Tabel C.I.I.
Pencapaian Kinerja
Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	0.60	60

Capaian kinerja dan penyerapan anggaran untuk kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah hingga tribulan II diantaranya yaitu:

1. Belanja barang pake habis

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - Bahan cetak sudah terlaksana sebesar Rp 350.000,-

2. Belanja barang pake habis

- Belanja makanan dan minuman Rapat belum terlaksana dengan anggaran sebesar Rp 750.000,-

SASARAN KEGIATAN
D. Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah

Administrasi umum merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan sistem administrasi dalam sebuah ruang lingkup kantor. Sistem manajemen dalam sebuah ruang lingkup perkantoran ini salah satu bagian dari manajemen yang memberikan informasi sesuai dengan bidang administrasi yang dibutuhkan untuk menunjang berjalannya suatu kegiatan secara efektif. Berikut adalah uraian capaian dari masing-masing indikator, sebagai berikut:

D.1. Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Berikut capaian kinerja jika dianalisis dari:

D.1.1. Perjanjian Kinerja

Capaian indikator ini jika dianalisis dari perjanjian kinerja (PK) setelah perubahan Tahun 2025 dengan target 22 paket dan selama tribulan II (dua) sudah terealisasi atau dengan capaian 50%, sedangkan realisasi anggaran pada Tr. II sebesar Rp 27.556.617,- dengan pagu anggaran Rp 96.107.539,50,- atau dengan capaian 28,67%, maka dalam hal ini kategori capaian sudah berhasil. Berikut dibawah ini dapat dilihat realisasi selama tribulan II (dua) Tahun 2025:

Tabel D.II.
Pencapaian Kinerja
Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	0,50	50%

Capaian kinerja dan penyerapan anggaran untuk kegiatan Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah hingga tribulan II diantaranya yaitu:

1. Belanja barang pakai habis:
 - Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat listrik belum terlaksana dengan anggaran sebesar Rp 0,-
2. Belanja barang pakai habis:
 - Belanja bahan-bahan lainnya belum terlaksana dengan anggaran sebesar Rp 2.461.591,-
 - Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor belum terlaksana dengan anggaran sebesar Rp 8.175.261,-
 - Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - kertas dan cover belum terlaksana dengan anggaran sebesar Rp 4.366.740,-
 - Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - benda pos sudah terlaksana sebesar Rp 500.000,-
3. Belanja barang pakai habis:
 - Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak sudah dilaksanakan sebesar Rp 1.000.000,-
4. Belanja barang pakai habis:
 - Belanja bahan - bahan bakar dan pelumas sudah dilaksanakan sebesar Rp 50.000,-
5. Belanja barang pakai habis:
 - Belanja makanan dan minuman jamuan tamu belum dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 1.200.000,-
6. Belanja barang pakai habis:
 - Belanja makanan dan minuman rapat sudah dilaksanakan sebesar Rp 450.000,-
 - Belanja perjalanan dinas biasa sudah dilaksanakan sebesar Rp 20.010.617,-
 - Belanja perjalanan dinas dalam kota sudah dilaksanakan sebesar Rp 5.546.000,-

SASARAN KEGIATAN E. Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kesiapan sarana dan prasarana kerja sangatlah dibutuhkan agar tidak menjadi sebuah kendala. Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) indikator, yaitu:

E.1. Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Berikut capaian kinerja jika dianalisis dari:

E.1.1. Perjanjian Kinerja

Capaian indikator ini jika dianalisis dari perjanjian kinerja (PK) Tahun 2025 dengan target 19 unit dan selama tribulan II (dua) belum terealisasi atau dengan capaian 0%, sedangkan realisasi anggaran Tr. II sebesar Rp 0,- dengan pagu anggaran sebesar Rp 61.490.570,- atau dengan capaian 0%, maka dalam hal ini kategori capaian belum berhasil. Kegiatan akan dilaksanakan pada tribulan berikutnya. Berikut dibawah ini dapat dilihat realisasi selama tribulan II (dua) tahun 2025:

Tabel E.II.
Pencapaian Kinerja
Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	0	0%

Capaian kinerja dan penyerapan anggaran untuk kegiatan Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah selama tribulan II diantaranya yaitu:

1. Belanja barang:

- Belanja peralatan dan mesin – alat studio, komunikasi dan pemancar – alat studio – peralatan studio audio belum terlaksana dengan anggaran sebesar Rp 537.240,-
- Belanja peralatan dan mesin - alat studio, komunikasi, dan pemancar - alat komunikasi - alat komunikasi radio UHF belum terlaksana dengan anggaran sebesar Rp 3.589.740,-

2. Belanja modal:

- Belanja modal alat rumah tangga lainnya (Home Use) belum terlaksana dengan anggaran sebesar Rp 2.109.000,-
- Belanja modal alat komunikasi telephone belum terlaksana dengan anggaran sebesar Rp 13.632.032,-
- Belanja modal personal computer belum terlaksana dengan anggaran sebesar Rp 31.743.558,-
- Belanja modal peralatan personal komputer belum terlaksana dengan anggaran sebesar Rp 9.879.000,

SASARAN KEGIATAN
F. Meningkatkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kesiapan sarana dan prasarana kerja sangatlah dibutuhkan agar tidak menjadi sebuah kendala. Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) indikator, yaitu:

F.1. Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Berikut capaian kinerja jika dianalisis dari:

F.1.1. Perjanjian Kinerja

Capaian indikator ini jika dianalisis dari perjanjian kinerja (PK) Tahun 2025 dengan target 24 laporan dan selama tribulan II (dua) sudah terealisasi atau dengan capaian 50%, sedangkan realisasi anggaran Tr. II sebesar Rp 450.222.435,- dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.155.597.000,- atau dengan capaian 38,96%, maka dalam hal ini kategori capaian sudah berhasil. Berikut dibawah ini dapat dilihat realisasi selama tribulan II (dua) tahun 2025:

Tabel F.II.
Pencapaian Kinerja
Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	0,50	50%

Capaian kinerja dan penyerapan anggaran untuk kegiatan Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama tribulan II diantaranya yaitu:

1. Belanja jasa kantor:

- Belanja tagihan telepon sudah terlaksana sebesar Rp 2.061.276,-
- Belanja tagihan air sudah terlaksana sebesar Rp 3.018.100,-
- Belanja tagihan listrik sudah terlaksana sebesar Rp 138.129.165,-

2. Belanja jasa kantor:

- Belanja jasa tenaga administrasi sudah terlaksana sebesar Rp 136.000.000,-

- Belanja jasa tenaga kebersihan sudah terlaksana sebesar Rp 39.516.600,-
- Belanja jasa tenaga keamanan sudah terlaksana sebesar Rp 40.500.000,-
- Belanja jasa tenaga sopir sudah terlaksana sebesar Rp 7.500.000,-
- Belanja jasa pengolahan sampah sudah terlaksana sebesar Rp 1.000.000,-
- Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN sudah dilaksanakan sebesar Rp 75.687.647,-
- Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN sudah dilaksanakan sebesar Rp 3.026.509,-
- Belanja iuran jaminan kematian kerja bagi non ASN sudah dilaksanakan sebesar Rp 3.783.138,-

SASARAN KEGIATAN G. Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
--

Dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kesiapan sarana dan prasarana kerja sangatlah dibutuhkan agar tidak menjadi sebuah kendala. Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) indikator, yaitu:

G.1. Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Berikut capaian kinerja jika dianalisis dari:

G.1.1. Perjanjian Kinerja

Capaian indikator ini jika dianalisis dari perjanjian kinerja (PK) Tahun 2025 dengan target 55 laporan selama triwulan II (dua) dan sudah terealisasi dengan capaian 29,09%, sedangkan realisasi anggaran Tr. II sebesar Rp 47.832.300,- dengan pagu anggaran sebesar Rp 189.969.500,- atau dengan capaian 25,18%, maka dalam hal ini kategori capaian sudah berhasil. Berikut dibawah ini dapat dilihat realisasi selama triwulan II (dua) tahun 2025:

Tabel G.II.
Pencapaian Kinerja
Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	0,2909	29,09%

Capaian kinerja dan penyerapan anggaran untuk kegiatan Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama triwulan II diantaranya yaitu:

1. Belanja barang pakai habis: Belanja bahan - bahan bakar dan pelumas sudah terlaksana sebesar Rp 33.415.000,-
 - Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan darat bermotor - kendaraan dinas bermotor sudah terlaksana sebesar Rp 4.492.100,-
 - Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan darat bermotor penumpang belum terlaksana dengan anggaran sebesar Rp 5.000.000,-
 - Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor angkutan barang sudah terlaksana sebesar Rp 1.765.000,-
 - Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor beroda dua sudah terlaksana sebesar Rp 510.200,-
 - Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor beroda tiga belum terlaksana dengan anggaran sebesar Rp 1.200.000,-
2. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin:
 - Belanja alat besar - alat bantu - electric generating set belum dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 17.280.000,-
3. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin:
 - Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat rumah tangga - alat pendingin belum dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 8.400.000,-
 - Belanja pemeliharaan komputer - komputer unit - personal komputer sudah terlaksana sebesar Rp 5.250.000,-

- Belanja pemeliharaan komputer - peralatan komputer - peralatan personal komputer sudah terlaksana sebesar Rp 2.400.000,-

2.4. Rencana Tindak Lanjut.

Tindak lanjut dan upaya dalam penyediaan sarana dan prasarana dan pengembangan sumber daya aparatur diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan kerja secara profesional. Maka diperlukan sebuah prestasi terhadap pencapaian kinerja dan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara sebagai bentuk pertanggungjawaban dari ASN terhadap Negara dan Masyarakat.

2.1. Tanggapan Atasan Langsung.

- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

.....

.....

.....

.....

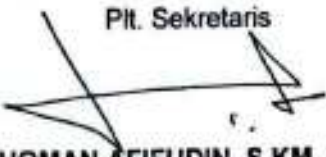
.....

BAB III
PENUTUP

Laporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tribulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2022, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan dari 16 (enam belas) target yang ditetapkan dengan 7 (tujuh) sasaran kegiatan selama Tribulan II (dua) ada anggaran yang belum diwujudkan dengan baik karena akan dilaksanakan di trimester berikutnya.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Plt. Sekretaris


LUQMAN AFIFUDIN, S.KM, M.PH
NIP. 19810516 200604 1 014

Lumajang, 3 Juli 2025

Kasubbag Umum dan Kepegawaian


DIAH TRIANA WIJAYANTI, S.Pd.
NIP. 19701002 200701 2 013

**LAPORAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PENGADMINISTRASI UMUM
Tribulan II**

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja jabatan fungsional umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 2 (dua) target kinerja dengan 2 (dua) sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya peralatan dan mesin lainnya dan terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yaitu :

1. Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
2. Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

2.2. Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan hingga Tribulan II Tahun 2025:

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja
Tribulan I TAHUN 2025

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
1. Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33 Unit	16 Unit	50%	-
2. Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	22 Unit	50%	-

2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☐ Laporan kurang baik
☒ Laporan sudah baik
☐ Laporan diperbaiki
☐ Target dan realisasi diteliti ulang
☐ Capaian diteliti ulang
☐ Lain-lain

BAB III PENUTUP

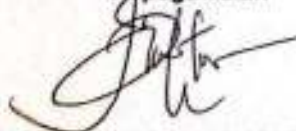
Laporan Kinerja Jabatan Fungsional Umum Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam pencapaian sasaran dan target yang diperjanjikan tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung

Lumajang, 02 Juli 2025

Kepala Sub. Bag Umum dan
Kepegawaian

Pengadministrasi Umum




DIAH TRIANA WIJAYANTI, S.Pd
NIP. 19701002 200701 2 013

HASYIM ASY'ARI
NIP. 19681218 198603 1 001

LAPORAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
TRIBUNAN II

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja jabatan fungsional umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Penelaah Teknis Kebijakan dengan Seketaris Dinas Pariwisata adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 1 (satu) target kinerja dengan 1 (satu) sasaran kegiatan yaitu Tersediannya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah, yaitu :

1. Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi

2.2. Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan hingga Tribunal II Tahun 2025 :

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja
Tribulan II TAHUN 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
Tersediannya Lapoaran Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokum en	6 Dokum en	50 %	-

2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Jabatan Fungsional Umum Bendahara pada Sekretariat Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam pencapaian sasaran dan target yang diperjanjikan tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kepala Sub Bag. Umum Dan Kepegawaian



DIAH TRIANA WIJAYANTI, S.Pd
NIP. 19701002 200701 2 013

Lumajang, 02 Juli 2025

Penelaah Teknis Kebijakan



BUDI SETIAWAN
NIP. 19770713 200901 1 002

LAPORAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
Tribulan II

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja jabatan fungsional umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Operator Layanan Operasional pada Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Operator Layanan Operasional dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 2 (dua) target kinerja dengan 2 (dua) sasaran sub kegiatan yaitu Tersediannya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Tersediannya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, yaitu :

1. Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan;
2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

2.2. Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan hingga Tribulan II Tahun 2025:

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja
Tribulan II TAHUN 2025

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
1. Tersediannya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak	9 Paket	0 Paket	0%	-

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
2. Tersediannya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	6 Laporan	50 %	

2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

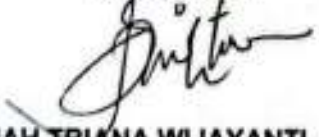
- ☐ Laporan kurang baik
☒ Laporan sudah baik
☐ Laporan diperbaiki
☐ Target dan realisasi diteliti ulang
☐ Capaian diteliti ulang
☐ Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Jabatan Fungsional Operator Layanan Operasional pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam pencapaian sasaran dan target yang diperjanjikan tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Sub. Bag Umum dan
Kepegawaian


DIAH TRIANA WIJAYANTI, S.Pd
 NIP. 19701002 200701 2 013

Lumajang, 02 Juli 2025

Operator Layanan Operasional


NGADI
 NIP. 19700929 201001 1 004

LAPORAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
Tribulan II TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja jabatan fungsional umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Perkantoran dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 2 (dua) target kinerja dengan 2 (dua) sasaran sub kegiatan yaitu Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu dan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, yaitu :

1. Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2.2. Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan hingga Tribulan II Tahun 2025 :

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja
Sampai dengan Tribulan II TAHUN 2025

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
1. Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	6 Laporan	50 %	-
2. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	2 Laporan	66.66 %	-

2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Jabatan Fungsional Umum Pengadministrasi Perkantoran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam pencapaian sasaran dan target yang diperjanjikan tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Sub. Bag Umum dan
Kepegawaian



DIAH TRIANA WIJAYANTI, S.Pd
NIP. 19701002 200701 2 013

Lumajang, 02 Juli 2025

Pengadministrasi Perkantoran



ADAWIYAH GR
NIP. 19700804 200701 2 017

LAPORAN KINERJA TENAGA KERJA BULANAN

Tribulan II

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggung jawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja Tenaga Kerja Bulanan pada umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Tenaga Kerja Bulanan pada Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Tenaga Kerja Bulanan dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 1 (satu) target kinerja dengan satu (1) sasaran kegiatan meningkatnya ketertiban administrasi kepegawaian, yaitu :

1. Jumlah Dokumen, Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kerja pegawai

2.2. Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan hingga Tribulan II Tahun 2025 :

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja
s.d Tribulan II TAHUN 2025

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
1. Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen, Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	2 Dokumen	40 %	-

2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☐ Laporan kurang baik
☒ Laporan sudah baik
☐ Laporan diperbaiki
☐ Target dan realisasi diteliti ulang
☐ Capaian diteliti ulang
☐ Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tenaga Kerja Bulanan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam pencapaian sasaran dan target yang diperjanjikan tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik

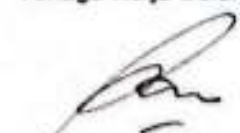
Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Sub. Bag Umum dan
Kepegawaian


DIAH TRIANA WIJAYANTI, S.Pd
NIP. 19701002 200701 2 013

Lumajang, 02 Juli 2025

Tenaga Kerja Bulanan


RATNA DEWI KARTIKASARI

LAPORAN KINERJA TENAGA KERJA BULANAN

TRIBUNAN II TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja Tenaga Kerja Bulanan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Tenaga Kerja Bulanan pada Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Tenaga Kerja Bulanan dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 2 (dua) target kinerja dengan 2 (dua) sasaran sub kegiatan, yaitu :

1. Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Yang dilaksanakan;
2. Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang dilaksanakan

2.2. Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan hingga Tribunal II Tahun 2025:

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja
Tribunal II TAHUN 2025

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
1. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1. Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Yang dilaksanakan	5 Dokumen	2 Dokumen	40 %	-
2. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	2. Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang dilaksanakan	12 Laporan	6 Laparon	50 %	-

2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, target kinerja tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Sub. Bag Umum dan
Kepegawaian



DIAH TRIANA WIJAYANTI, S.Pd
NIP. 19701002 200701 2 013

Lumajang, 02 Juli 2025

Tenaga Kerja Bulanan



RIZKY KUSUMA

LAPORAN KINERJA TENAGA KERJA BULANAN TRIBUNAN II TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja Tenaga Kerja Bulanan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Pengemudi pada Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Tenaga Kerja Bulanan dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 1 (satu) target kinerja dengan 1 (satu) sasaran sub kegiatan, yaitu :

1. Jumlah penyediaan bahan/material yang dilaksanakan;

2.2. Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan hingga Tribulan II Tahun 2025 :

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja
Tribulan II TAHUN 2025

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
1. Terlaksananya Penyediaan Bahan/Matrial	1. Jumlah Penyediaan bahan/matrial yang dilaksanakan	2 Paket	1 Paket	50 %	-

2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- ☐ Laporan kurang baik
 - ☒ Laporan sudah baik
 - ☐ Laporan diperbaiki
 - ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
 - ☐ Capaian diteliti ulang
 - ☐ Lain-lain
-
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Jabatan Fungsional Umum Pengemudi pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam pencapaian sasaran dan target yang diperjanjikan tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Sub. Bag Umum dan
Kepegawaian



DIAH TRIANA WIJAYANTI, S.Pd
NIP. 19701002 200701 2 013

Lumajang, 02 Juli 2025

Tenaga Kerja Bulanan



MUKHAMMAD HAERUL

LAPORAN KINERJA TENAGA KERJA BULANAN TRIBUNAN II TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja jabatan fungsional umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Tenaga Kerja Bulanan pada Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Tenaga Kerja Bulanan dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 3 (tiga) target kinerja dengan 3 (tiga) sasaran sub kegiatan, yaitu :

1. Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Disediakan ;
2. Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah;
3. Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor;

2.2. Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan hingga Tribulan II Tahun 2025 :

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja
Tribulan II TAHUN 2025

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	$\frac{5-4}{3}$	6
1. Terlaksananya Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang	1. Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0 %	-
2. Terlaksananya Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2. Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	6 Dokumen	50 %	-
3. Terlaksananya Pelaporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3. Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	6 Laporan	50 %	-

2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, target kinerja tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Sub. Bag Umum dan
Kepegawaian



DIAH TRIANA WIJAYANTI, S.Pd
NIP. 19701002 200701 2 013

Lumajang, 02 Juli 2025

Tenaga Kerja Bulanan



ULFA TRIYUNIATI

—

LAPORAN KINERJA TENAGA KERJA BULANAN TRIBUNAN II TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja jabatan fungsional umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Tenaga Kerja Bulanan pada Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan (1) satu target kinerja dengan satu (1) sasaran sub kegiatan, yaitu :

1. Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu Yang Dilaksanakan

2.2. Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan hingga Tribulan II Tahun 2025:

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja
Tribulan II TAHUN 2025

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
1. Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1. Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu Yang di Laksanakan	360 Kali	180 Kali	50 %	-

2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☐ Laporan kurang baik
☒ Laporan sudah baik
☐ Laporan diperbaiki
☐ Target dan realisasi diteliti ulang
☐ Capaian diteliti ulang
☐ Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, target kinerja tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Sub. Bag Umum dan
Kepegawaian



DIAH TRIANA WIJAYANTI, S.Pd
NIP. 19701002 200701 2 013

Lumajang, 02 Juli 2025

Tenaga Kerja Bulanan



DESI WAHYUNI

LAPORAN KINERJA TENAGA KERJA BULANAN
TENAGA KERJA BULANAN
TRIBULAN II 2025

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja jabatan fungsional umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Tenaga Kerja Bulanan pada Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Tenaga Kerja Bulanan dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 18 target kinerja dengan 8 sasaran kegiatan yaitu meningkatnya mekanisme persediaan barang, yaitu :

1. Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah
2. Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
3. Jumlah penyediaan bahan logistik kantor yang disediakan
4. Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
5. Jumlah bahan material yang disediakan
6. Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya
7. Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
8. Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

2.2. Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan hingga Tribulan II Tahun 2025

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja
Tribulan II TAHUN 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
1. Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah	12 Laporan	6 Laporan	60%	
2. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	0 Paket	0 Paket	0%	
3. Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	
4. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	0 Paket	0%	
5. Tersedianya bahan material	Jumlah bahan material yang disediakan	1 Paket	0 Paket	0%	
6. Tersedianya peralatan dan mesin	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 Unit	1 Unit	100%	
7. Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	0 Laporan	60%	
8. Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1 Unit	0 Unit	0%	

a. **TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

- ☐ Laporan kurang baik
☒ Laporan sudah baik
☐ Laporan diperbaiki
☐ Target dan realisasi diteliti ulang
☐ Capaian diteliti ulang
☐ Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Jabatan Fungsional Umum Tenaga Kerja Bulanan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam pencapaian sasaran dan target yang diperjanjikan tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

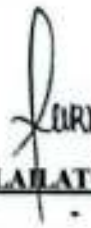
Mengetahui,
Atasan Langsung

Lumajang, 02 Juli 2025
Tenaga Kerja Bulanan

Kepala Sub. Bag Umum dan
Kepegawaian



DIAH TRIANA WIJAYANTI, S.Pd
NIP. 19701002 200701 2 013



FARISKA LAILATUL MAGFIROH

LAPORAN KINERJA TENAGA KERJA BULANAN TRIBUNAN II TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja jabatan fungsional umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Tenaga Kerja Bulanan pada Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Tenaga Kerja Bulanan dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan enam (6) target kinerja dengan satu (1) sasaran kegiatan yaitu meningkatnya meningkatnya ketertiban administrasi aset dan barang, yaitu :

1. Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang dilaksanakan
2. Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

2.2. Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan hingga Tribulan II Tahun 2025 :

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja
Tribulan I TAHUN 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	$5=4/3$	6
Meningkatnya ketertiban Adminitrasi aset dan barang	1. Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang dilaksnakan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	

	2. Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	0 Laporan	0%	Masi proses realisasi
--	---	--------------	--------------	----	-----------------------

a. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☐ Laporan kurang baik
☒ Laporan sudah baik
☐ Laporan diperbaiki
☐ Target dan realisasi diteliti ulang
☐ Capaian diteliti ulang
☐ Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Jabatan Fungsional Umum Tenaga Kerja Bulanan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam pencapaian sasaran dan target yang diperjanjikan tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kepala Sub. Bag Umum dan
Kepegawaian


DIAH TRIANA WIJAYANTI, S.Pd
NIP. 19701002 200701 2 013

Lumajang, 02 Juli 2025
Tenaga Kerja Bulanan


DENI TRI SETIAWAN

LAPORAN KINERJA TENAGA KERJA BULANAN

Tribulan II TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggung jawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja Tenaga Kerja Bulanan pada umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Tenaga Kerja Bulanan pada Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Tenaga Kerja Bulanan dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 1 (Satu) target kinerja dengan satu (1) sasaran kegiatan meningkatnya ketertiban administrasi kepegawaian, yaitu :

1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2.2. Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan hingga Tribulan II Tahun 2025 :

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja
Tribulan II Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	1 Laporan	0,33%	-

a. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

.....

.....

.....

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tenaga Kerja Bulanan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam pencapaian sasaran dan target yang diperjanjikan tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Sub. Bag Umum dan
Kepegawaian



DIAH TRIANA WIJAYANTI, S.Pd
NIP. 19701002 200701 2 013

Lumajang, 2 Juli 2025

Tenaga Kerja Bulanan



SITI MAISAROH, SM

LAPORAN KINERJA TENAGA KERJA BULANAN
PETUGAS KEAMANAN KANTOR
TRIBUNAN II TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja Tenaga Kerja Bulanan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Petugas Keamanan pada Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Petugas Keamanan dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 1 (Satu) target kinerja dengan 1 (satu) sasaran sub kegiatan yaitu :

1. Jumlah Operasional Penjagaan Keamanan Dinas Pariwisata Kawasan Wonorejo Terpadu yang dilaksanakan.

2.2. Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan hingga Tribulan II Tahun 2025 :

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja
Tribulan II TAHUN 2025

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Targ et	Realisasi	Capai an	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
1. Operasional Penjagaan Keamanan Dinas Pariwisata Kawasan Wonorejo Terpadu	1. Jumlah Operasional Penjagaan Keamanan Dinas Pariwisata Kawasan Wonorejo Terpadu yang dilaksanakan	360 Kali	180 Kali	50%	-

2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- ☐ Laporan kurang baik
- ☐ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Jabatan Fungsional Umum Petugas Keamanan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam pencapaian sasaran dan target yang diperjanjikan tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Sub. Bag Umum dan
Kepegawaian



DIAH TRIANA WIJAYANTI, S.Pd
NIP. 19701002 200701 2 013

Lumajang, 02 Juli 2025

Petugas Keamanan



AMARUL FARUQ

LAPORAN KINERJA TENAGA KERJA BULANAN
PETUGAS KEAMANAN KANTOR
Tribulan II Tahun 2025

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasanannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja jabatan fungsional umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Petugas Keamanan pada Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Petugas Keamanan dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 1 (Satu) target kinerja dengan 1 (satu) sasaran sub kegiatan yaitu :

1. Jumlah Operasional Penjagaan Keamanan Dinas Pariwisata Kawasan Wonorejo Terpadu yang dilaksanakan

2.2. Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan hingga Tribulan II Tahun 2025 :

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja
Tribulan II TAHUN 2025

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Targ et	Realisasi	Capai an	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
1. Operasional Penjagaan Keamanan Dinas Pariwisata Kawasan Wonorejo Terpadu	1. Jumlah Operasional Penjagaan Keamanan Dinas Pariwisata Kawasan Wonorejo Terpadu yang dilaksanakan	360 Kali	180 Kali	50%	-

2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Jabatan Fungsional Umum Petugas Keamanan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam pencapaian sasaran dan target yang diperjanjikan tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Sub. Bag Umum dan
Kepegawaian



DIAH TRIANA WIJAYANTI, S.Pd
NIP. 19701002 200701 2 013

Lumajang, 02 Juli 2025

Petugas Keamanan



RISKI SAHRONI

LAPORAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PENGADMINISTRASI UMUM
Tribulan II

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja jabatan fungsional umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 2 (dua) target kinerja dengan 2 (dua) sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya peralatan dan mesin lainnya dan terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yaitu :

1. Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
2. Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

2.2. Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan hingga Tribulan II Tahun 2025:

2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Jabatan Fungsional Umum Petugas Keamanan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam pencapaian sasaran dan target yang diperjanjikan tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Sub. Bag Umum dan
Kepegawaian



DIAH TRIANA WIJAYANTI, S.Pd
NIP. 19701002 200701 2 013

Lumajang, 02 Juli 2025

Petugas Keamanan



MUHAMMAD SAIFUL RIZAL

LAPORAN KINERJA TENAGA KERJA BULANAN
PETUGAS KEAMANAN KANTOR
Tribulan II Tahun 2025

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja jabatan fungsional umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Petugas Keamanan pada Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Petugas Keamanan dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 1 (Satu) target kinerja dengan 1 (satu) sasaran sub kegiatan yaitu :

1. Jumlah Operasional Penjagaan Keamanan Dinas Pariwisata Kawasan Wonorejo Terpadu yang dilaksanakan

2.2. Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan hingga Tribulan II Tahun 2025 :

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja
Tribulan II TAHUN 2025

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Targ et	Realisasi	Capai an	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
1. Operasional Penjagaan Keamanan Dinas Pariwisata Kawasan Wonorejo Terpadu	1. Jumlah Operasional Penjagaan Keamanan Dinas Pariwisata Kawasan Wonorejo Terpadu yang dilaksanakan	360 Kali	180 Kali	50%	-

LAPORAN KINERJA TENAGA KERJA BULANAN
PETUGAS KEAMANAN KANTOR
TRIBULAN II TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja jabatan fungsional umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Petugas Keamanan pada Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Petugas Keamanan dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 1 (Satu) target kinerja dengan 1 (satu) sasaran sub kegiatan yaitu :

1. Jumlah Operasional Penjagaan Keamanan Dinas Pariwisata Kawasan Wonorejo Terpadu yang dilaksanakan

2.2. Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan hingga Tribulan II Tahun 2025 :

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja
TRIBULAN II TAHUN 2025

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Targ et	Realisasi	Capai an	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
1. Operasional Penjagaan Keamanan Dinas Pariwisata Kawasan Wonorejo Terpadu	1. Jumlah Operasional Penjagaan Keamanan Dinas Pariwisata Kawasan Wonorejo Terpadu yang dilaksanakan	360 Kali	180 Kali	50%	-

2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Jabatan Fungsional Umum Petugas Keamanan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam pencapaian sasaran dan target yang diperjanjikan tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Sub. Bag Umum dan
Kepegawaian



DIAH TRIANA WIJAYANTI, S.Pd
NIP. 19701002 200701 2 013

Lumajang, 02 Juli 2025

Petugas Keamanan



BAIDOWI

LAPORAN KINERJA TENAGA KERJA BULANAN
PRAMU KEBERSIHAN
Tribulan II Tahun 2025

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja jabatan fungsional umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Pramu kebersihan pada Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Pramu Kebersihan dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 1 (satu) target kinerja dengan 1 (satu) sasaran sub kegiatan, yaitu :

1. Jumlah Operasional Kebersihan Kantor Yang dilaksanakan;

2.2. Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan hingga Tribulan II Tahun 2025 :

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja
Tribulan II TAHUN 2025

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	$5=4/3$	6
I. Operasional Kebersihan Kantor	I. Jumlah Operasional Kebersihan Kantor Yang Dilaksanakan	360 Hari	180 Hari	50%	

2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- ☐ Laporan kurang baik
- ☐ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Jabatan Fungsional Umum Pramu Kebersihan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam pencapaian sasaran dan target yang diperjanjikan tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Sub. Bag Umum dan
Kepegawaian



DIAH TRIANA WIJAYANTI, S.Pd
NIP. 19701002 200701 2 013

Lumajang, 02 Juli 2025

Pramu Kebersihan



EKA DARMAWAN

LAPORAN KINERJA ESELON III
KEPALA BIDANG DESTINASI PARIWISATA
Tribulan II Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bidang Destinasi Pariwisata terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tribulan II Tahun 2025 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Destinasi Pariwisata.

Bidang Destinasi Pariwisata merupakan salah satu bagian yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan SOTK dan Penjabaran Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2021, Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Destinasi
- b. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang destinasi pariwisata
- c. Pelaksanaan pengelolaan daya tarik wisata;
- d. pelaksanaan penyedia layanan jasa usaha pariwisata;
- e. pelaksanaan pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
- f. pelaksanaan pengelolaan destinasi pariwisata;

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
- h. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Dinas Pariwisata;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Struktur Organisasi Bidang Destinasi Pariwisata terdiri dari beberapa Sub. Kegiatan, diantaranya :

- a. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
- b. Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
- c. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
- d. Pengelolaan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota;
- e. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
- f. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Wisata Kabupaten/Kota;
- g. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Kabupaten/Kota;
- h. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Kabupaten/Kota;
- i. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata.

Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai peran penting dalam mendukung keberhasilan sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang serta dalam mengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) beserta pencapaiannya. Dengan adanya hal itu maka Bidang Destinasi Pariwisata adalah salah satu dari empat (4) Pilar Pariwisata dengan Industri Pariwisata yang sekaligus dalam satu bidang Destinasi Pariwisata Kabupaten Lumajang dengan Seksi Jasa Usaha Pariwisata.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Dinas Pariwisata dengan Kepala Bidang Destinasi Pariwisata adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 1 (satu) Target Kinerja dengan 1 (satu) Sasaran Program yaitu Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata yang Memenuhi Kriteria 3A dengan indikator kinerja : Persentase Daya Tarik Destinasi Wisata yang Memenuhi Kriteria 3A (*Attraction, Accessibility, Amenities*).

2.2 Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tribulan II Tahun 2025:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Tribulan II Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5=4/3
Meningkatnya Daya Tarik Wisata yang Memenuhi Kriteria 3A	Persentase Daya Tarik Destinasi Wisata yang Memenuhi Kriteria 3A	38% Daya Tarik DPK	0% Daya Tarik DPK	0 %

Tabel 2.2
Cost per outcome Bidang Destinasi Pariwisata
Tribulan II Tahun 2025

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	T	R	%	
1	Meningkatnya Daya Tarik Wisata yang Memenuhi Kriteria 3A	Persentase Daya Tarik Destinasi Wisata yang Memenuhi Kriteria 3A				2	2	100	
Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			2.324.461.746,5	739.074.128	31,80%				

2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

SASARAN PROGRAM :

A. Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata yang Memenuhi Kriteria 3A

Dalam rangka mendorong kepariwisataan di Kabupaten Lumajang sebagai implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang dan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yakni Visi " Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur, dan Bermartabat " sedangkan Misinya adalah "Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata". Destinasi Pariwisata adalah salah satu pilar dari 4 pilar Pembangunan Kepariwisata yaitu Destinasi Wisata, Industri Pariwisata, Kelembagaan Pariwisata, dan Pemasaran Pariwisata. Untuk itu dalam kegiatannya Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas yang salah satunya adalah meningkatkan Citra Pariwisata dan adanya penerapan standar pada Industri Pariwisata, Sehingga dalam kegiatannya bidang destinasi pariwisata berusaha untuk meningkatkan kualitas pada destinasi pariwisata, untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata tercipta indikator kinerja presentase daya tarik destinasi wisata yang memenuhi kriteria 3A. Dengan anggaran Rp. 2.503.002.805 dan Triwulan II Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 337.296.000 dengan capaian 13,48%. Berikut adalah uraian capaian dari masing-masing indikator kegiatan, sebagai berikut :

A.1 Jumlah Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang memenuhi kriteria pada 3A (*Attraction, Accesbility, Amenities*) dengan ditunjang oleh 4 kegiatan

a. Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota

Sejalan dengan perkembangan Daya Tarik Wisata di Indonesia dan dunia pada umumnya, Daya Tarik Wisata di Kabupaten Lumajang juga telah menunjukkan perkembangan yang signifikan setelah Desa Wisata terbentuk pada 21 kecamatan tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki paradigma baru bahwa pariwisata bisa dijadikan sebagai sektor yang dapat menyokong perekonomian

mereka. Munculnya para pelaku pariwisata merupakan hal yang positif atas kesadaran masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan khususnya di Kabupaten Lumajang. Dengan anggaran Rp. 340.800.000 pada Tribulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 17.000.000 dengan capaian 4,99%. Bentuk upaya adalah dengan meningkatkan *Length of Stay* (LoS) atau waktu lama tinggal pada hotel dan penginapan sebagai salah satu indikator lamanya kunjungan wisatawan dengan rata-rata lama tinggal 1,0 hari per bulan Desember 2025

Target kinerja kegiatan pengelolaan daya tarik wisata pada tahun 2025 sebesar 18 DTW. Samapi dengan Tribulan II terealisasi sebesar 0

b. Meningkatkan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota

Kegiatan meningkatkan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten / kota , yaitu dengan adaya indikator kinerja sebagai berikut :

1. Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang direncanakan
2. Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang dikembangkan
3. Jumlah Sarana prasarana Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang tersedia
4. Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang dimonitoring dan dikelola

Dengan anggaran Rp. 68.300.000 pada Tribulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 17.000.000 dengan capaian 24,89%.

Target kinerja kegiatan pengelolaan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota pada tahun 2025 sebesar 3 KSP. Sampai dengan Tribulan II terealisasi sebesar 3 KSP

c. Destinasi Pariwisata Yang Dikelola

Kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang dikelola terdiri dari 3A, yaitu:

1. Atraksi meliputi alam, budaya, buatan
2. Akses meliputi infrastruktur transportasi dan infrastruktur informasi
3. Amenitas meliputi sarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, investasi.

Ketersediaan amenities sebagai sarana penunjang pariwisata merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pengembangan daya tarik wisata. Contoh fasilitas

pendukung pariwisata yaitu rumah makan, air bersih, tempat parkir, toilet, dan lain-lain.

Dengan anggaran Rp 1.557.342.253 pada Tribulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 657.874.128 dengan capaian 42,24%.

Target kinerja kegiatan pengelolaan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota pada tahun 2025 sebesar 3 Destinasi. Sampai dengan Tribulan II terealisasi sebesar 0

d. Meningkatnya Pengelolaan Jasa Usaha Pariwisata Kabupaten / Kota

Sejalan dengan perkembangan industri pariwisata di Indonesia dan dunia pada umumnya, jasa usaha pariwisata di Kabupaten Lumajang juga telah menunjukkan perkembangan yang signifikan setelah Desa Wisata terbentuk pada 21 kecamatan tahun 2014 lalu melalui Peraturan Bupati Lumajang No. 79 Tahun 2014 tentang Penetapan Destinasi Wisata Satu Kecamatan Satu Desa Wisata. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki paradigma baru bahwa jasa usaha pariwisata bisa dijadikan sebagai sektor yang dapat menyokong perekonomian mereka. Tumbuhnya para pelaku jasa usaha pariwisata merupakan hal yang positif atas kesadaran masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan khususnya di Kabupaten Lumajang. Dengan anggaran Rp. 103.475.000 pada Tribulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 25.500.000 dengan capaian 24,64%.

Target kinerja kegiatan pengelolaan jasa usaha pariwisata pada tahun 2025 sebesar 2,92%. Sampai dengan Tribulan II terealisasi sebesar 0,72%, hal ini dapat dihitung dengan jumlah usaha yang ber-LSU per jumlah sasaran jasa usaha yaitu 4 Jasa usaha yang ber-LSU dari 553 jasa usaha yang sudah berizin OSS dan Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota sebesar 130 laporan sampai dengan Tribulan II terealisasi 0 laporan

A.2. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Bidang Destinasi Pariwisata, pada Tahun 2025 memiliki target sebagai berikut :

Tabel A.2.1

Perjanjian Kinerja Bidang Destinasi Pariwisata Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata yang Memenuhi Kriteria 3A	Presentase Daya Tarik Destinasi Wisata yang Memenuhi Kriteria 3A	25%	0

Jumlah destinasi wisata yang memenuhi kriteria 3A pada tahun 2025 adalah 11 DTW. Berdasarkan rencana aksi Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai perjanjian kinerja dengan sasaran kegiatan meningkatnya daya tarik destinasi wisata yang memenuhi kriteria 3A dengan indikator kinerja presentase daya tarik destinasi wisata yang memenuhi kriteria 3A dengan capaian sasaran program terdapat pagu anggaran sebesar **Rp 2.324.461.746,50** dan terealisasi sebesar **Rp 739.074.128** dan tercapai **31,80%** pada Tribulan II.

Tabel A.2.2
Pencapaian Kinerja Bidang Destinasi Pariwisata
Tribulan II Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5=4/3
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata yang Memenuhi Kriteria 3A	Presentase Daya Tarik Destinasi Wisata yang Memenuhi Kriteria 3A	25%	0%	0%

Berdasarkan Rencana Aksi Bidang Destinasi Pariwisata pada Tribulan II:

Presentase aya tarik destinasi wisata yang memenuhi kriteria 3A, target untuk Tribulan II tahun 2025 sebanyak 1 Daya Tarik Destinasi Wisata pada Tribulan II tahun 2025 terealisasi sebesar 0 Daya Tarik Destinasi Wisata dengan capaian 0%. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan *time schedule*. Sedangkan pagu anggaran **Rp. 2.324.461.746,50** terealisasi pada Tribulan II **Rp. 739.074.128** dengan capaian **31,80%**.

A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi Kinerja pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel A.2.3 di bawah ini

Tabel A.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tribulan II Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025 Tribulan II
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata yang Memenuhi Kriteria 3A	Presentase Daya Tarik Destinasi Wisata yang Memenuhi Kriteria 3A	1	100%	100%	0%.

Berdasarkan Tabel A.2.3. menunjukkan bahwa capaian realisasi Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata yang Memenuhi Kriteria 3A dari tahun 2022 sebesar 100% konstan pada tahun 2023 sebesar 100%. Pada tahun 2025 sampai dengan Tribulan II realisasi kinerja sebesar 0%. Diharapkan untuk realisasi kinerja tahun 2025 dapat terealisasi dengan baik sampai dengan akhir Tribulan II.

A.4. Perencanaan Strategis

Berdasarkan perencanaan strategis kinerja bidang destinasi pariwisata pada tahun 2025 memiliki target :

Presentase daya tarik destinasi wisata yang memenuhi kriteria 3A (*Attraction, Accesbility, Amenities*) dengan target sebanyak 1 daya tarik destinasi wisata dengan kriteria fasilitasi pengelolaan daya tarik wisata dan jasa usaha pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata dan pengelolaan kawasan strategi pariwisata dengan serapan anggaran **31,80%** pada Tribulan II.

2.4 Rencana Tindak Lanjut

Akan dilakukan pendataan dan observasi lapangan untuk mengetahui Destinasi Wisata yang memenuhi kriteria pada 3A (Attraction, Accesbility, Amenities) sampai dengan Tribulan ke IV, indikator kinerja terealisasi Daya Tarik Destinasi Wisata dengan capaian 100%. Diharapkan kegiatan Bidang Destinasi Pariwisata bisa segera tercapai sesuai dengan jadwal yang sudah di tentukan.

2.5 Tanggapan Atasan Langsung

- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

BAB III PENUTUP

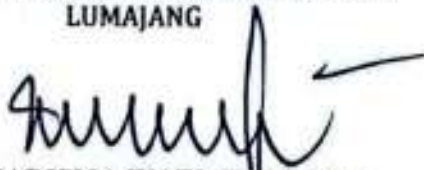
Laporan Kinerja pada Tribulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang No. 8 Tahun 2021, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari target sasaran program yang ditetapkan akan dilaksanakan pada tribulan selanjutnya mengingat saat ini masih dalam tahap pelaksanaan dengan progress penyerapan anggaran sudah tercapai 31,80%.
3. Tidak ada kendala dalam realisasi anggaran dan pencapaian target kinerja untuk Tribulan II. Pada Tribulan II ini belum ada realisasi kegiatan karena masih pada tahap pengajuan anggaran dan perencanaan. Untuk realisasi kegiatan akan dimulai pada tribulan selanjutnya.
4. Anggaran pemeliharaan obyek wisata Waterpark mengalami pergeseran untuk asuransi dan akan dianggarkan kembali pada saat perubahan anggaran tahun 2025

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG

Lumajang, 04 Juni 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN
LUMAJANG



YULI HARISMA WATI, SP. M. Ling
NIP. 19690703 199602 2 002

KEPALA BIDANG DESTINASI PARIWISATA



RICKO DHARMA PUTRA, S.STP
NIP. 19910128 201507 1 001

**LAPORAN KINERJA KOORDINATOR
PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA
Tribulan II Tahun 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tribulan II Tahun 2025 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata.

Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang ada pada Bidang Destinasi Pariwisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2021, Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi pengelolaan destinasi;
- b. Menyusun penetapan destinasi pariwisata;
- c. Menyusun perencanaan destinasi pariwisata;
- d. Melaksanakan pengembangan destinasi pariwisata;
- e. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata;
- f. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata;
- g. Melaksanakan penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan;
- h. Memonitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan destinasi pariwisata;

- i. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang Destinasi Pariwisata;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata.

Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota mempunyai peran penting dalam mendukung keberhasilan sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang serta dalam mengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi beserta pencapaiannya Pemerintah (SAKIP).

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dan Koordinator Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya destinasi pariwisata yang dikelola.

2.2 Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tribulan II Tahun 2025:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Tribulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	3	0	0

Tabel 2.2
Cost per outcome
Tribulan II Tahun 2025

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	%	T	R	%	
	Sub Kegiatan : Pengembangan destinasi pariwisata kab/kota	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	25.000.000	4.700.000	18,8	2	0	0	

1	Sub Kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1.557.342.253	657.874.128	42,24	140 Unit	70	50
	Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	40.800.000	17.000.000	41,67	1 Dokumen	0	0
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	222.627.244	0	0	4 Laporan	0	0
	Program : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota		1.845.769.497	679.574.128	36,82			

2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Kegiatan pada Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota TA. 2025 terfokus pada pengembangan destinasi pariwisata yang terintegrasi. Evaluasi dan analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN: DESTINASI PARIWISATA YANG DIKELOLA

Kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang dikelola terdiri dari 4A, yaitu:

1. Atraksi meliputi alam, budaya, buatan
 2. Akses meliputi infrastruktur transportasi dan infrastruktur informasi
 3. Amenitas meliputi sarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, investasi.
- Ketersediaan amenities sebagai sarana penunjang pariwisata merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pengem

4. bangunan daya tarik wisata. Contoh fasilitas pendukung pariwisata yaitu rumah makan, air bersih, tempat parkir, toilet, dan lain-lain.

5. Ancilliary meliputi lembaga pengelola destinasi wisata. Lembaga tersebut akan menjadi bermanfaat bagi wisatawan karena mereka akan di mudahkan dengan berbagai layanan seperti informasi, keamanan , dan berbagai layanan lainnya.

Dengan anggaran **Rp. 1.845.769.497** pada Tribulan II Tahun 2025 terealisasi **Rp. 679.574.128** dengan capaian **36,82%**. Anggaran dan Realisasi serapan tersebut terdiri dari :

Tabel 2.3
Pagu dan Realisasi Tribulan II Tahun 2025

Sasaran / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
		Pagu	Realisasi	%	T	R	%	
Sub Kegiatan Pengembangan destinasi pariwisata kab/kota	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	25.000.000	0	0	3	0	0	
Sub Kegiatan Pengadaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1.557.342.253	657.874.128	42,24	1	0	0	
Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	40.800.000	17.000.000	16,67	1	0	0	
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	222.627.244	0	0	4	0	0	
Total Anggaran :		1.845.769.497	679.574.128	36,82				

Berikut adalah uraian capaian dari masing-masing indikator, sebagai berikut :

Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara

Sarana dan prasarana pariwisata yang lancar merupakan salah satu indikator perkembangan pariwisata. Sarana/prasarana diartikan sebagai proses tanpa hambatan dari pengadaan dan peningkatan hotel, restoran, tempat hiburan dan sebagainya serta prasarana jalan dan transportasi yang lancar dan terjangkau oleh wisatawan. Prasarana (*infrastructures*) adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk

dapat memenuhi kebutuhannya. Sarana kepariwisataan (*tourism infrastructure*) adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar prasarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan pada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam. Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya.

Daerah Kabupaten Lumajang dan pembangunan infrastruktur / fasilitas penunjang destinasi pariwisata.

Tabel 2.4

Obyek Wisata yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah

NO	NAMA OBYEK WISATA	DESA
1	PA. SELOKAMBANG	PURWOSONO
2	WATER PARK	KEDUNGJAJANG
3	RANU KLAKAH DAN RANU PAKIS	TEGALRANDU DAN RANU PAKIS
4	REST AREA I DAN II B29	ARGOSARI

2. Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Destinasi Pariwisata Kabupaten Lumajang yang sudah ditetapkan akan menjadi arah pembangunan dan kebijakan untuk pengembangan yang terencana dan berkonsep sehingga daya tarik serta sumber daya alam maupun manusianya juga bertumbuh seiring peningkatan dan pengembangan daerah prioritas. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai kegiatan pengawasan dari kegiatan perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata kabupaten sehingga lebih mudah dalam hal pengarahan dan terkonsep serta sejalan dengan pengembangan destinasi pariwisata nasional.

3. Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota merupakan suatu sub-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan dan memberdayakan kondisi masyarakat secara aktif dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Peran pelaku usaha pariwisata pada destinasi pariwisata membutuhkan beberapa pelatihan dan peningkatan

kapasitas sebagai pengembangan manajemen pengelola sesuai standar yang di butuhkan Destinasi Pariwisata yang di kelola. Dengan adanya Sumber daya yang optimal akan meningkatkan tata kelola dan daya saing bagi Destinasi Pariwisata. Pengelola tetap dituntut untuk berinovasi dan kreatif dalam meningkatkan kunjungan wisatawan selain dukungan dari Pemerintah Daerah melalui kerjasama pengelolaan barang milik daerah sebagai fasilitas penunjang yang bertujuan untuk membantu meningkatkan nilai ekonomi dari sektor pariwisata. Tujuan pemberdayaan masyarakat pada destinasi pariwisata adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan ini harus diarahkan agar dapat merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Perencanaan dalam kegiatan pemberdayaan ini harus bisa mengusahakan mereka untuk mempunyai kesempatan mengakses sumber-sumber ekonomi. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia/ pelaku usaha pariwisata adalah dengan cara harus ikut serta berpartisipasi dan berperan aktif dalam membangun destinasi pariwisata pada wilayah yang ditinggali.

4. Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan merupakan konsep berwisata yang memberikan dampak terhadap lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi. Pengelolaan sebuah destinasi pariwisata harus mengacu pada penerapan pada *sustainable tourism* karena hal ini akan berdampak secara langsung pada kelestarian lingkungan. Pemerintah Daerah bisa membantu dalam pembentukan aturan/ regulasi penerapan sebuah destinasi pariwisata yang berkelanjutan sehingga pengembangan pariwisata di masa yang akan datang akan lebih mengutamakan pada kelestarian lingkungan.

2.4 Rencana Tindak Lanjut

Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata menyesuaikan Kinerja sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi yang ada dalam Bidang Destinasi Pariwisata.

2.5 Tanggapan Atasan Langsung

☐

Laporan kurang baik

☒

Laporan sudah baik

☐

Laporan diperbaiki

☐

Target dan realisasi diteliti ulang

☐

Capaian diteliti ulang

☐

Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

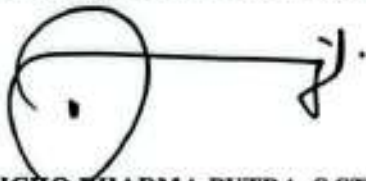
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Kerjasama Kepariwisata berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2021, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Pelaksanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota ditunda karena terkendala Efisiensi Anggaran.
3. Ada penyusutan anggaran untuk pelaksanaan pengembangan wisata Rawa Krasak karena terkendala Efisiensi anggaran.

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG

Lumajang, 03 Juli 2025

KEPALA BIDANG DESTINASI PARIWISATA

KOORDINATOR



RICKO DHARMA PUTRA, S.STP
NIP. 19910128 201507 1 001



IWAN SUPRIYANTO
NIP. 19680425 199403 1 010

**LAPORAN KINERJA KOORDINATOR
JASA USAHA PARIWISATA
Tribulan II Tahun 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggung jawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasanmya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Kegiatan Pengelolaan Jasa Usaha Pariwisata terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tribulan II Tahun 2025 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Koordinator Kegiatan Pengelolaan Jasa Usaha Pariwisata.

Kegiatan Pengelolaan Jasa Usaha Pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang ada pada Bidang Destinasi Pariwisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2021 Kegiatan Pengelolaan Jasa Usaha Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Pengelolaan Jasa Usaha;
- b. Menyusun standarisasi jasa usaha pariwisata;
- c. Memberikan layanan rekomendasi jasa usaha;
- d. Fasilitasi investasi pariwisata;
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan jasa usaha;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang Destinasi Pariwisata;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata.

Kegiatan Pengelolaan Jasa Usaha Pariwisata mempunyai peran penting dalam mendukung keberhasilan sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang serta dalam mengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi beserta pencapaiannya Pemerintah (SAKIP).

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dengan Koordinator Pengelolaan Jasa Usaha Pariwisata adalah dengan menyatakan dan menjanjikan akan mewujudkan Sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya Pengelolaan Jasa Usaha Pariwisata (JUP).

2.2 Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tribulan II tahun 2025 :

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Jasa Usaha Pariwisata
Tribulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	130	3	2,3
Program : Meningkatnya Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		103.475.000	25.500.000	24,64%

Tabel 2.2
Cost per outcome
Tribulan II Tahun 2025

	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	%	T	R	%	
	Tersedianya Layanan Fasilitas Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	75.415.000	25.500.000	33,81	130	0	0	

Meningkatnya Jumlah Usaha Pariwisata yang memiliki Sertifikat Standar Usaha dari Lembaga OSS	Jumlah Usaha yang Tersertifikasi melalui Lembaga OSS sebelum beroperasi	28.000.000	0	0	50	0	0	
Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata daerah Kabupaten/Kota		103.475.000	25.500.000	24,64				
Kegiatan : Peningkatan Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota Yang Memenuhi Standar								
Total Anggaran :		103.475.000	25.500.000	24,64				

2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator kinerja terhadap sasaran pada kegiatan pengelolaan Jasa Usaha Pariwisata secara anggaran mengalami Perubahan Anggaran Kegiatan pada Tribulan II. Kegiatan pada Pengelolaan Jasa Usaha Pariwisata TA. 2025.

SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Pengelolaan Jasa Usaha Pariwisata Kabupaten / Kota

Sejalan dengan perkembangan industri pariwisata di Indonesia dan dunia pada umumnya, jasa usaha pariwisata di Kabupaten Lumajang juga telah menunjukkan perkembangan yang signifikan setelah Desa Wisata terbentuk pada 21 kecamatan tahun 2014 lalu melalui Peraturan Bupati Lumajang No. 79 Tahun 2014 tentang Penetapan Destinasi Wisata Satu Kecamatan Satu Desa Wisata. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki paradigma baru bahwa jasa usaha pariwisata bisa dijadikan sebagai sektor yang dapat menyokong perekonomian mereka. Tumbuhnya para pelaku jasa usaha pariwisata merupakan hal yang positif atas kesadaran masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan khususnya di Kabupaten Lumajang. Dengan anggaran Rp. 103.475.000 pada Tribulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 25.500.000 dengan capaian 24,64%. Anggaran dan Realisasi serapan tersebut terdiri dari :

Tabel 2.2
Pagu dan Realisasi Tribulan II Tahun 2025

Sasaran / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
		Pagu	Realisasi	%	T	R	%	
Tersedianya Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	75.415.000	25.500.000	33,81	130	0	0	

Meningkatnya Jumlah Usaha Pariwisata yang memiliki Sertifikat Standar Usaha dari Lembaga OSS	Jumlah Usaha yang Tersertifikasi melalui Lembaga OSS sebelum beroperasi	28.060.000	0	0	50	0	0	
Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata daerah Kabupaten/Kota		103.475.000	25.500.000	24,64				
Kegiatan : Peningkatan Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota Yang Memenuhi Standar								
Total Anggaran :		109.200.000	25.500.000	24,64				

Berikut adalah uraian capaian dari masing-masing indikator, sebagai berikut :

Kegiatan Pengelolaan Jasa Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota

1. Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang sebagai *leading sector* dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Lumajang memiliki peran dan andil dalam membina dan mengawasi pelaku jasa usaha pariwisata yang sebagian besar berasal dari sektor swasta / masyarakat mengingat banyak masyarakat pelaku jasa usaha pariwisata di Kabupaten Lumajang belum memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) diganti dengan NIB. Disamping itu dalam upaya peningkatan kapasitas pelaku jasa usaha pariwisata dalam melayani wisatawan maka mereka sangat perlu untuk dibina. Sehingga pada akhirnya berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan di Kabupaten Lumajang. Berkaitan dengan hal tersebut di atas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melaksanakan kegiatan pembinaan pelaku jasa usaha pariwisata di Kabupaten Lumajang dengan sasaran 13 Bidang Jasa Usaha Pariwisata yaitu sebagai berikut :

- 1) Daya Tarik Wisata;
- 2) Jasa Transportasi Wisata;
- 3) Jasa Perjalanan Wisata;
- 4) Jasa Makanan Dan Minuman;
- 5) Penyediaan Akomodasi;
- 6) Kawasan Pariwisata;
- 7) Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi;
- 8) Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, Dan Pameran;
- 9) Jasa Informasi Pariwisata;

- 10) Jasa Konsultan Pariwisata;
- 11) Jasa Pramuwisata;
- 12) Wisata Tirta;
- 13) Spa.

2.4 Rencana Tindak Lanjut

Sektor jasa usaha pariwisata berperan penting dalam mendukung kepariwisataan di Kabupaten Lumajang. Untuk meningkatkan daya saing global maka para pengusaha jasa usaha pariwisata di Kabupaten Lumajang perlu memiliki TDUP sebagai dokumen resmi usahanya. Untuk itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang akan tetap melakukan kegiatan sosialisasi dan pembinaan terhadap jasa usaha pariwisata dengan harapan semua jasa usaha pariwisata memiliki TDUP. Para pelaku jasa usaha pariwisata dapat meningkatkan kapasitasnya dalam melayani wisatawan. Sehingga sesuai dengan sasaran kegiatan pada Bidang Destinasi yakni Meningkatnya Pengelolaan Jasa Usaha Pariwisata Kabupaten / Kota.

2.5 Tanggapan Atasan Langsung

- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

.....

.....

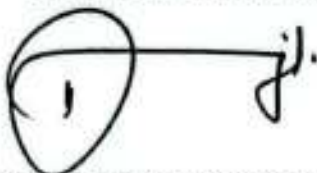
BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Kerjasama Kepariwisata berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2021, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Ada tambahan program Peningkatan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memenuhi standar.

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG

KEPALA DINAS PARIWISATA



RICKO DHARMA PUTRA, S.STP
NIP. 19910128 201507 1 001

Lumajang, 03 Juli 2025

KOORDINATOR



IWAN SUPRIYANTO
NIP. 19680425 199403 1 010

**LAPORAN KINERJA KOORDINATOR
PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGI PARIWISATA
Tribulan II Tahun 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasanannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tribulan II Tahun 2025 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata.

Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang ada pada Bidang Destinasi Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan SOTK dan Penjabaran Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2021, Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
- b. menyusun perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata
- c. menyusun penetapan Kawasan Strategis Pariwisata;
- d. melaksanakan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata;
- e. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
- f. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
- g. melaksanakan penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan;

- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
- i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang Destinasi Pariwisata;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata.

Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata mempunyai peran penting dalam mendukung keberhasilan sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang serta dalam mengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi beserta pencapaiannya Pemerintah (SAKIP).

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dan Koordinator Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan sasaran kegiatan yaitu meningkatkan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.

2.2 Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan Tribulan II Tahun 2025:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata
Tribulan II Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Kawasan Strategis pariwisata kabupaten /kota yang di kelola	3 KSPK	0	0%

Tabel 2.2
Cost per outcome
Tribulan II Tahun 2025

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	%	T	R	%	
1	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Stategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	27.500.000	0	0	84	0	0	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Pariwisata Kabupaten/Kota	40.800.000	17.000.000	41,67	3	0	0	
	Program : Terlaksananya		68.300.000	17.000.000	24,89				

Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator kinerja terhadap sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota

Kegiatan meningkatkan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten / kota , yaitu dengan adanya indikator kinerja sebagai berikut :

1. Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang direncanakan
2. Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang dikembangkan
3. Jumlah Sarana prasarana Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang tersedia
4. Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang dimonitoring dan dikelola

Dengan anggaran Rp. 68.300.000 pada Tribulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 17.000.000 dengan capaian 24,89%. Anggaran dan Realisasi serapan tersebut terdiri dari :

Tabel 2.3
Pagu dan Realisasi Tribulan II Tahun 2025

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	T	R	%	
1	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Kawasan Strategis pariwisata kabupaten /kota yang di kelola	68.300.000	17.000.000	24,89	3	0	100	
	Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota		68.300.000	17.000.000	24,89				

Berikut adalah uraian capaian dari masing-masing indikator, sebagai berikut :

Kegiatan Pengeloaan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota

1. Jumlah Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota

Dengan adanya kegiatan pengembangan di wilayah maka dibutuhkan monitoring dan evaluasi terkait dengan pengelolaan kelembagaan dan kondisi terkini dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Pada tahun 2025 sebagian besar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota difokuskan pada wilayah KSPN, karena wilayah tersebut sebagai prioritas pengembangan pariwisata nasional. Program Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dilakukan pada TA. 2025 oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dengan belanja beban upah tenaga administrasi.

2.4 Rencana Tindak Lanjut

Pada Tribulan II tahun 2025 target kegiatan yang dapat terlaksana berupa kegiatan rutin belanja jasa Administrasi tenaga kantor (upah pegawai bulanan) dan monitoring dan evaluasi 3 KSP untuk kegiatan yang belum terlaksana akan dilaksanakan pada Tribulan selanjutnya sesuai dengan target yang masih ada di kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata.

2.5 Tanggapan Atasan Langsung

- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

.....

.....

.....

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang No. 8 Tahun 2021;
2. Pencapaian sasaran kegiatan yang diperjanjikan saat ini terdapat pagu anggaran sebesar **Rp.68.300.000** dan terealisasi sebesar **Rp.17.000.000** dan tercapai **24,89%** dari seluruh besaran pagu anggaran.

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG

Kepala Bidang Destinasi Pariwisata



RISKO DHARMA PUTRA, S.STP
NIP. 19910128 201507 1 001

Lumajang, 03 Juli 2025

KOORDINATOR



IWAN SUPRIYANTO
NIP. 19680425 199403 1 010

**LAPORAN KINERJA KOORDINATOR
PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA
TRIBUNAL II Tahun 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggung jawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tribunal II Tahun 2025 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Koordinator Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata.

Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata merupakan salah satu kegiatan yang ada pada Bidang Destinasi Pariwisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2021 Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata;
- b. Menyusun penetapan daya tarik wisata;
- c. Menyusun rencana pengembangan daya tarik wisata;
- d. Melaksanakan pengembangan daya tarik wisata;
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan daya tarik wisata;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang Destinasi Pariwisata;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata.

Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata mempunyai peran penting dalam mendukung keberhasilan sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang serta dalam mengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi beserta pencapaiannya Pemerintah (SAKIP).

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dengan Koordinator Pengelolaan Daya Tarik adalah dengan menyatakan dan menjanjikan akan mewujudkan Sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik wisata Kabupaten / Kota.

2.2 Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada TRIBULAN II tahun 2025 :

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata
Tribulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	52 DTW	0	0

Tabel 2.2
Cost per outcome
TRIBULAN II Tahun 2025

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	%	T	R	%	
	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan	200.000.000	0	0	52	0	0	
1	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	40.800.000	17.000.000	41,67	52	35	67,31	

2	Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Seruni dengan Tahapan (Rintis, Berkembang, Penantapan, Revitalisasi)	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	25.000.000	0	0	52	0	0	
	Terlaksananya Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan	Jumlah dokumen perencanaan dan perancangan Daya Tarik Wisata	75.000.000	0	0	1	0	0	
	Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		340.800.000	17.000.000	4,99				

2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator kinerja terhadap sasaran pada kegiatan pengelolaan daya tarik wisata secara anggaran mengalami Perubahan Anggaran Kegiatan pada Tribulan II. Kegiatan pada Pengelolaan Daya Tarik Wisata TA. 2025.

SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota

Sejalan dengan perkembangan Daya Tarik Wisata di Indonesia dan dunia pada umumnya, Daya Tarik Wisata di Kabupaten Lumajang juga telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2023 jumlah DTW sebanyak 105 dan meningkat jumlahnya menjadi 247 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki paradigma baru bahwa pariwisata bisa dijadikan sebagai sektor yang dapat menyokong perekonomian mereka. Munculnya para pelaku pariwisata merupakan hal yang positif atas kesadaran masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan khususnya di Kabupaten Lumajang. Dengan anggaran **Rp. 340.800.000** pada Tribulan II Tahun 2025 terealisasi **Rp. 17.000.000** dengan capaian **4,99%**. Anggaran dan Realisasi serapan tersebut terdiri dari :

Tabel 2.2
Pagu dan Realisasi TRIBULAN II Tahun 2025

Sasaran / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
		Pagu	Realisasi	%	T	R	%	
Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan	200.000.000	0	0	52	0	0	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	40.800.000	17.000.000	41,67	52	35	67,31	
Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rantisasi, Berkembang, Pematangan, Revitalisasi)	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	25.000.000	0	0	52	0	0	
Terlaksananya Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan	Jumlah dokumen perencanaan dan perancangan Daya Tarik Wisata	75.000.000	0	0	1	0	0	
Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		340.800.000	17.000.000	4,99				

Berikut adalah uraian capaian dari masing-masing indikator, sebagai berikut :

Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

1. Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

Daya Tarik Wisata dijelaskan sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, kemudahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan. Syarat-syarat Untuk Daerah Daya Tarik Wisata a) What to see. Di tempat tersebut harus ada objek dan atraksi wisata yang berbeda dengan yang dimiliki daerah lain. Dengan kata lain daerah tersebut harus memiliki daya tarik khusus dan atraksi budaya yang dapat dijadikan "entertainment" bagi wisatawan. What to see meliputi pemandangan alam, kegiatan, kesenian dan atraksi wisata.

Maksudnya adalah sesuatu yang menarik untuk dilihat b) What to do. Di tempat tersebut selain banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lama ditempat itu. Maksudnya adalah sesuatu aktivitas yang dapat dilakukan di tempat itu. c) What to buy. Tempat tujuan wisata harus tersedia fasilitas untuk berbelanja terutama barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk di bawa pulang ke tempat asal. d) What to arrived. Di dalamnya termasuk aksesibilitas, bagaimana kita mengunjungi daya tarik wisata tersebut, kendaraan apa yang akan digunakan dan berapa lama tiba ketempat tujuan wisata tersebut. e) What to stay. Bagaimana wisatawan akan tinggal untuk sementara selama dia berlibut. Diperlukan penginapan-penginapan baik hotel berbintang atau hotel non berbintang dan sebagainya.

2. Jumlah Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata

Perencanaan pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan untuk dapatnya bisa terhubung maupun terkoneksi antar masing-masing Daya Tarik Wisata yang sudah memiliki konsep tema guna saling mendukung dalam menciptakan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian pariwisata bersinergitas.

Strategi pengembangan mengacu pada 3A yaitu :

- a. Atraksi meliputi alam, budaya dan buatan.
- b. Akses meliputi infrastruktur transportasi dan infrastruktur informasi.
- c. Amenitas meliputi sarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, investasi.

Ketersediaan amenities sebagai sarana penunjang pariwisata merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pengembangan daya tarik wisata, contoh fasilitas pendukung pariwisata yaitu : rumah makan, air bersih, tempat parkir, toilet dan lain-lain.

3. Monitoring dan evaluasi pengelolaan Daya Tarik Wisata

Daya Tarik Wisata dijelaskan sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, kemudahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota difokuskan pada wilayah KSPN, karena wilayah tersebut sebagai prioritas pengembangan pariwisata nasional.

2.4 Rencana Tindak Lanjut

Sektor daya tarik wisata sebagai sasaran wisatawan untuk berkunjung baik sendiri, kelompok dan atau keluarga difasilitasi sarana dan prasarana untuk kebutuhan wisatawan

yang berkunjung dan bisa menetap dalam suatu kawasan yang menjadi destinasi (daerah tujuan) wisata yang berdaya saing dengan memperkenalkan potensi masing-masing daya tarik wisata dalam wilayah Kabupaten/Kota yang dimiliki dari masing-masing daya tarik wisata Kabupaten/Kota, untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang akan melakukan penetapan dan rencana pengembangan dengan menjaga kearifan lokal dengan menerbitkan dasar regulasi peraturan yang dapatnya membantu dalam pemenuhan/kemudahan mitra kerja antar pemerintah dan pengelola daya tarik wisata.

2.5 Tanggapan Atasan Langsung

- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

.....

.....

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Kerjasama Kepariwisata berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2021, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi sebanyak 52 DTW sudah terlaksana pada tahun anggaran sebelumnya yang sebanyak 35 DTW;

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG

Kepala Bidang Destinasi Pariwisata



RICKO DHARMA PUTRA, S.STP
NIP. 19910128 201507 1 001

Lumajang, 03 Juli 2025

KOORDINATOR



IWAN SUPRIYANTO
NIP. 19680425 199403 1 010

**LAPORAN KINERJA
JABATAN PRAMU KEBERSIHAN
TRIBUNAN II TAHUN 2025**

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja di obyek wisata terhadap persentase kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan persentase kinerja sebagai petugas Koordinator Obyek di Obyek Wisata Water Park.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara petugas Koordinator Obyek di Obyek Wisata Water Park dengan Kepala Bidang Destinasi Pariwisata adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan target kinerja dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya pelayanan kepariwisataan di obyek wisata meliputi :

1. Jumlah kebersihan obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga
2. Jumlah keindahan obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga
3. Jumlah keamanan obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga

2.2. Persentase Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas persentase target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2025:

Tabel 2.2.1 Prosentase Kinerja
Prosentase Kinerja Sebagai Koordinator Obyek
di Obyek Wisata Water Park

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase	Keterangan
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	15 Unit	8 Unit	53,33%	

2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☐ Laporan kurang baik
☒ Laporan sudah baik
☐ Laporan diperbaiki
☐ Target dan realisasi diteliti ulang
☐ Prosentase diteliti ulang
☐ Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam penProsentase sasaran yang diperjanjikan, target kinerja tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung



RICKO DHARMA PUTRA, S.STP
NIP. 19910128 201507 1 001

Lumajang, 2 Juli 2025
Koordinator Obyek Wisata



BUDI
NIP. 19730602 201001 1 001

LAPORAN KINERJA
JABATAN PENGADMINISTRASI UMUM
TRIBULAN II TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja di obyek wisata terhadap persentase kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan persentase kinerja sebagai petugas administrasi loket di Obyek Wisata Water Park.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara petugas administrasi loket di Obyek Wisata Water Park dengan Kepala Bidang Destinasi Pariwisata adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan target kinerja dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya pelayanan kepariwisataan di obyek wisata meliputi :

1. Jumlah kebersihan obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga
2. Jumlah keindahan obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga
3. Jumlah keamanan obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga

2.2. Persentase Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas persentase target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2025:

Tabel 2.2.1 Prosentase Kinerja
Prosentase Kinerja Petugas Administrasi Loker di Obyek Water Park

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	15 Unit	8 Unit	53,33%	

2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain
-
-
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, target kinerja tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung



RICKO DHARMA PUTRA, S.STP
NIP. 19910128 201607 1 001

Lumajang, 2 Juli 2025
Tenaga Administrasi Locket



KASIATI
NIP. 19711115 200701 2 014

**LAPORAN KINERJA
JABATAN PRAMU KEBERSIHAN
TRIBUNAL II TAHUN 2025**

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja di obyek wisata terhadap persentase kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan persentase kinerja sebagai petugas administrasi loket di Obyek Wisata Ranu Pakis.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara petugas administrasi loket di Obyek Wisata Ranu Pakis dengan Kepala Bidang Destinasi Pariwisata adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan target kinerja dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya pelayanan kepariwisataan di obyek wisata meliputi :

1. Jumlah kebersihan obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga
2. Jumlah keindahan obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga
3. Jumlah keamanan obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga

2.2. Prosentase Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas Prosentase target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2025:

Tabel 2.2.1 Prosentase Kinerja

Prosentase Kinerja Petugas Administrasi Loker di Obyek Wisata Ranu Pakis

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase	Keterangan
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	10 Unit	6 Unit	60%	

2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☐ Laporan kurang baik
☒ Laporan sudah baik
☐ Laporan diperbaiki
☐ Target dan realisasi diteliti ulang
☐ Prosentase diteliti ulang
☐ Lain-lain
.....
.....
.....

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam penProsentasesasaran yang diperjanjikan, target kinerja tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung



RICKO DHARMA PUTRA, S.STP
NIP. 19910128 201507 1 001

Lumajang, 2 Juli 2025
Petugas Administrasi Loker



MAT YASIN
NIP. 19710209 200701 1 012

**LAPORAN KINERJA
JABATAN PRAMU KEBERSIHAN
TRIBUNAL II TAHUN 2025**

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja di obyek wisata terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja sebagai koordinator portir depan dan kebersihan kolam di obyek wisata Pemandian Alam Selokambang.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara koordinator portir depan dan kebersihan kolam di obyek wisata Pemandian Alam Selokambang dengan Kepala Bidang Destinasi Pariwisata adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan target kinerja dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya pelayanan kepariwisataan :

1. Jumlah kebersihan obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga
2. Jumlah keindahan obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga
3. Jumlah keamanan obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga

2.2. Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2025:

Tabel 2.2.1 Capaian Kinerja

**Capaian Kinerja Sebagai Koordinator Portir Depan Dan Kebersihan Kolam
di Obyek Wisata Pemandian Alam Selokambang**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	40 Unit	20 Unit	50%	

2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain
-
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, target kinerja tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung



RICKO BHARMA PUTRA, S.STP
NIP. 19910128 201507 1 001

Lumajang, 2 Juli 2025
Koordinator Obyek Wisata



MOCH. YANI
NIP. 19831106 200801 1 005

**LAPORAN KINERJA
JABATAN PRAMU KEBERSIHAN
TRIBUNAN II TAHUN 2025**

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja di obyek wisata terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja sebagai koordinator parkir di Obyek Wisata Pemandian Alam Selokambang.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara petugas koordinator parkir di obyek wisata Pemandian Alam Selokambang dengan Kepala Bidang Destinasi Pariwisata adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan target kinerja dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya pelayanan kepariwisataan :

1. Jumlah kebersihan obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga
2. Jumlah keindahan obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga
3. Jumlah keamanan obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga

2.2. Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2025:

Tabel 2.2.1 Capaian Kinerja
Capaian Kinerja Sebagai Koordinator Parkir
di Obyek Wisata Pemandian Alam Selokambang

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	40 Unit	20 Unit	50%	

2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain
-
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, target kinerja tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung



RICKO DHARMA PUTRA, S.STP
NIP. 19910128 201507 1 001

Lumajang, 2 Juli 2025
Penanggung Jawab Parkir



NURUDIN
NIP. 19710601 200701 1 017

**LAPORAN KINERJA
JABATAN PRAMU KEBERSIHAN
TRIBUNAN II TAHUN 2025**

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja di obyek wisata terhadap persentase kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan persentase kinerja sebagai petugas koordinator lapangan area segitiga ranu di Obyek Wisata Ranu Klakah.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara petugas administrasi di obyek wisata Ranu Klakah dengan Kepala Bidang Destinasi Pariwisata adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan target kinerja dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya pelayanan kepariwisataan di obyek wisata meliputi :

1. Jumlah kebersihan obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga
2. Jumlah keindahan obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga
3. Jumlah keamanan obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga
4. Jumlah laporan bulanan obyek wisata yang harus dibuat

2.2. Persentase Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas Persentase target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2025:

Tabel 2.2.1 Prosentase Kinerja
Prosentase Kinerja Sebagai Petugas Koordinator Lapangan Area Segitiga Ranu
di Obyek Wisata Ranu Klakah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase	Keterangan
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	20 Unit	10 Unit	50%	

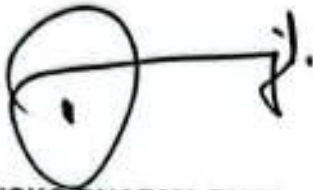
2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Prosentase diteliti ulang
- ☐ Lain-lain
-
-
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam penProsentase sasaran yang diperjanjikan, target kinerja tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung



RICKO DHARMA PUTRA, S.STP
NIP. 19910128 201507 1 001

Lumajang, 2 Juli 2025
Koordinator Obyek Wisata



SAWIR
NIP. 19700616 200701 1 021

LAPORAN KINERJA PEJABAT ESELON III
KEPALA BIDANG PEMASARAN KEPARIWISATAAN
s.d. Tribulan II

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggung jawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bidang Pemasaran Kepariwisata Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Bidang Pemasaran Kepariwisata Kinerja.

Bidang Pemasaran Kepariwisata merupakan salah satu Bidang yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2022, Bidang Pemasaran Kepariwisata mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata. Bidang Pemasaran Kepariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemasaran Kepariwisata;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana program pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
- c. penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam maupun luar negeri;
- d. penyelenggaraan dan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota;
- e. penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten baik dalam maupun luar negeri;
- f. peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

Struktur Organisasi Bidang Pemasaran Kepariwisata terdiri dari beberapa Sub. Kegiatan, diantaranya :

- a. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota Baik Dalam dan Luar Negeri;
- b. Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri;
- c. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri;
- d. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata;
- e. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Bidang Pemasaran Kepariwisata mempunyai peran penting dalam mengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Kabupaten Lumajang.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditanda tangani antara Kepala Dinas Pariwisata dengan Kepala Bidang Pemasaran Kepariwisata adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 1 (satu) Target Kinerja dengan 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu Meningkatkan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota, diantaranya :

1. Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan s.d Tribulan II Tahun 2025:

Tabel 1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
s.d Tribulan II Tahun 2025

a) Jumlah Kunjungan Wisata

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.209.490	871.439	72 %

- Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki target sebesar **1.209.490** Wisatawan, sampai dengan Tribulan II Tahun 2025 terealisasi sebesar **871.439** Wisatawan. Maka dalam hal ini kategori capaian kinerja **Belum Berhasil** dengan rata-rata capaian sebesar **72 %**.
- Berdasarkan Rencana Aksi Tribulan II Tahun 2025 memiliki target sebesar **354.000** Wisatawan dan Tribulan II Tahun 2025 terealisasi sebesar **559.292** Wisatawan, Maka dalam hal ini kategori capaian kinerja **Sangat Berhasil** dengan rata-rata capaian sebesar **158 %**. Tribulan I 2025 ada beberapa obyek wisata yang Pengelola belum menyetorkan Rekap Kunjungan Bulan Juni 2025.

Tabel 1.2
Data Kunjungan Wisatawan
s.d Tribulan II Tahun 2025

No	Nama Obyek Wisata	Wisnus	Wisman	Jumlah
1	Goa Teles	991	-	991
2	G. Lemongan	858	-	858
3	Hutan Bambu	61,155	-	61,155
4	Kolam Renang Veteran	2,993	-	2,993
5	Pantai Bambang	16,822	-	16,822
6	Air Terjun Kapas Biru	5,962	25	5,987
7	Pantai Watu Pecak	87,783	-	87,783
8	Pantai Wotgalih	16,718	-	16,718
9	Pemandian Alam Tirtosari	71,976	-	71,976
10	Pemandian Joyokarto	20,398	-	20,398
11	Pemandian Alam Selokambang	70,014	-	70,014
12	Pemandian Tirlowono	8,969	-	8,969
13	Puncak B29	1,753	6	1,759

14	Pura Mandara Giri Semeru Agung	634	-	634
15	Ranu Pani	7,274	-	7,274
16	Ranu Regulo	24,950	2	24,952
17	Ranu Klakah	9,740	-	9,740
18	Ranu Pakis	478	-	478
19	Ranu Bedali	2,587	-	2,587
20	Kawasan Situs Biting	140	-	140
21	Taman Wisata TPI Tempursari	-	-	-
22	Museum Daerah Kab. Lumajang	2,907	-	2,907
23	Waterpark	9,666	-	9,666
24	Air Terjun Tumpak Sewu Semeru	34,219	48,300	82,519
25	Kawasan Pantai Dampar Indah	5,106	-	5,106
26	Pemandian Telaga Semeru	195	-	195
27	Air Terjun Sumber Telu	825	-	825
28	Wisata Agro Kertowono	-	-	-
29	Pemandian Surojoyo	19,792	-	19,792
30	Gunung Wayang	-	-	-
31	Pemandian Al-Kautsar	1,654	-	1,654
32	Tumpak Selo	212,857	5	212,862
33	Buper	-	-	-
34	Taman Wisata Tambuh Raya Idaman	18,487	-	18,487
35	Taman Bunga You and I	1,823	-	1,823
36	Simbar Semeru	1,036	-	1,036
37	Dodolan Kampung	-	-	-
38	Sumber Nah	-	-	-
39	Sumber Pakel	-	-	-
40	Sumber Takir	15,625	-	15,625
41	Kali Pinusan Poncosumo	22,698	34	22,732
42	Kapas Ijo	-	-	-
43	Pemandian Alam Semeru	9,612	-	9,612
44	Panorama Kapas Biru	-	-	-
45	Teras Semeru	33,284	1,559	34,843
46	Grojogan Sewu	-	-	-
47	Pemandian Tirta Bening	-	-	-
48	Air Terjun Kabut Pelangi	-	-	-
49	Agrowisata Goatzilla Farm	-	-	-
50	Pemandian PG Jatiroto	14,719	-	14,719
51	Randu Pinus	4,808	-	4,808
TOTAL		821,508	49,931	871,439

KETERANGAN :

1. Kawasan Situs Biting kosong dengan keterangan bahwa tidak terdapat Pengelola DTW, akan tetapi ada Juru pelihara yang tidak konsisten mengirimkan Data tersebut.
2. Pantai TPI Tempursari kosong dikarenakan tidak terdapat Pengelola di DTW tersebut.
3. Pemandian Telaga Semeru tidak terdapat Pengelola.
4. Gunung Wayang di tutup karena Perjanjian Kerjasama dengan Perhutani tidak dilanjutkan, Terdapat titik longsor pada lokasi dan Permasalahan dengan warga sekitar.
5. Pengelola Kapas Ijo masih tahap pengurusan perjanjian kerjasama dengan Pihak Perhutani.
6. Grojogan Sewu ditutup sesuai Arahan Bupati Lumajang. Langkah selanjutnya adalah Penghitungan pengunjung dijadikan satu dengan Pengelolaan Air Terjun Tumpak Sewu.

Tabel 1.3
Capaian Kinerja Bidang Pemasaran
s.d Tribulan II Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	1. Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan	100 %	50 %	50 %

TABEL 1.4
Cost Per Outcome Bidang Pemasaran
s.d Tribulan II Tahun 2025

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	T	R	%	
1	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	1. Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan				100	50	50	
	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota		524.874.500	111.710.570	21.28 %				

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota

Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Bidang Pemasaran Kepariwisata dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan berbagai bentuk bimbingan baik yang bersifat kolektif maupun yang bersifat khusus (sesuai permintaan). Dengan anggaran **Rp. 524.874.500** dan terealisasi sampai dengan Tribulan II 2025 sebesar **Rp. 111.710.570** dengan capaian **21.28 %**. Berikut adalah uraian capaian dari masing-masing indikator, sebagai berikut :

1. Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan

Perkembangan Dunia Pariwisata di Kabupaten Lumajang sangatlah cepat. Daya Tarik Wisata di Kabupaten Lumajang banyak dikenal masyarakat luas, mulai dari Daya Tarik Wisata alam, buatan dan budaya. Akan tetapi semua itu dianggap tidak berguna bagi masyarakat setempat apabila masyarakatnya kurang sadar terhadap wisata. Pemerintah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang memasarkan/ mempromosikan Daya Tarik Wisata tersebut untuk lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Beberapa potensi wisata diharapkan semua pengelola selalu bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk bagaimana cara mengembangkan dan memperkenalkan Daya Tarik Wisata yang sudah dimiliki.

1.1 Perjanjian Kinerja

- Berdasarkan Perjanjian Kinerja Bidang Pemasaran Kepariwisata Tahun 2025 memiliki target sebesar **100 (seratus) %**, sampai dengan Triwulan II terealisasi sebesar **50 (lima puluh) %**. Maka dalam hal ini kategori capaian kinerja **Belum Berhasil** dengan rata-rata capaian sebesar **50 %**.
- Berdasarkan Rencana Aksi Bidang Pemasaran Kepariwisata Triwulan II Tahun 2025 memiliki target sebesar **25 %**. Pada Triwulan II Tahun 2025 terealisasi sebesar **25 %**. Maka dalam hal ini kategori capaian kinerja **Sangat Berhasil** dengan rata-rata capaian sebesar **100 %**.

Tabel 1.1
Pencapaian Kinerja
s.d Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan	100 %	50 %	50 %

1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun lalu

Pada Tahun 2024 mempunyai target sebesar 12.5% dan Terealisasi sebesar 3.125% pada Triwulan II Tahun 2024. Sedangkan Tahun 2025 mempunyai target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 50 % sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

Tabel 1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja
s.d Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan	100 %	-	-	3.125	50 %

1.3 Perencanaan Strategis

Berdasarkan Perencanaan Strategis Bidang Pemasaran memiliki target sebesar 100 (seratus) %. Sampai dengan Tribulan II Tahun 2025 terealisasi sebesar 50 (lima puluh) %. Maka dalam hal ini kategori capaian kinerja belum berhasil dengan rata-rata capaian sebesar 50 %.

Tabel 1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan	100 %	50 %	50 %

1.4 Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Standar Nasional

Untuk pengukuran standar nasional pada indikator ini tidak ada.

Tabel 1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi Th. 2025	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan	50 %	-	-

D. Rencana Tindak Lanjut.

Tindak lanjut dan upaya dalam program kerja Tahun 2025 adalah Melanjutkan dan mempertahankan kinerja yang sudah ada dan bisa lebih meningkatkan kinerja yang sebelumnya.

E. Tanggapan Atasan Langsung

- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kepala Bidang Pemasaran sampai dengan Tribulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Pengembangan Kinerja berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 1 (satu) Indikator Kinerja dengan 1 (satu) sasaran program.

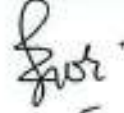
Lumajang, 3 Juli 2025

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG
KEPALA DINAS PARIWISATA



YULI HARISMA WATI, SP., M.Ling
NIP.19690703 199602 2 002

KEPALA BIDANG PEMASARAN KEPARIWISATAAN



YULI ANNISA H. SST.Par
NIP. 19810712 201001 2 024

LAPORAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA
s.d Tribulan II

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut.

Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda merupakan salah satu Sub Koordinator Kegiatan pada Bidang Pemasaran Kepariwisata yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang nomor 188.45/494/427.12/2022 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Pariwisata, mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menyusun profil industri;
- b. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. Melakukan analisis profil industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkelanjutan;
- d. Menyusun standar kompetensi jenis pekerjaan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah diidentifikasi;
- e. Menyusun kriteria program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif;
- f. Menyusun bahan terkait seleksi penyelenggaraan program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif;
- g. Menyusun bahan verifikasi lapangan penyelenggaraan program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif;
- h. Menyusun telaah potensi Ekonomi Kreatif pada kabupaten/kota;
- i. Menyusun usulan rencana kerja bidang kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- j. Menyusun deskripsi produk indikasi geografis sektor Ekonomi Kreatif;
- k. Melakukan identifikasi bahan komersialisasi perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
- l. Melakukan pendampingan transformasi digital pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda mempunyai peran penting dalam mendukung keberhasilan sasaran strategis Bidang Pemasaran Kepariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang serta dalam mengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi beserta pencapaiannya Pemerintah (SAKIP).

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditanda tangani antara Kepala Bidang Pemasaran Kepariwisata dengan Sub. Koordinator Kegiatan adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan **2 (dua)** target kinerja dengan **2 (dua)** sasaran kegiatan yaitu :

1. Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota, diantaranya :

a. Penguatan Promosi Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri

- Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

b. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata

- Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri

2.2 Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja sampai dengan Tribulan II Tahun 2025:

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Individu
s.d Tribulan II Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1. Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan	100 %	50 %	50 %
Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	a. Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Promosi	1 Promosi	50 %
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata	b. Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	-	-

Tabel 2.3
Cost Per Outcome
s.d Tribulan I Tahun 2025

No	Sasaran / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	%	T	R	%	
1	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan				100	50	50	
	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota		524.874.500	111.710.570	21.28				

2.3 Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Atas capaian target kinerja masing-masing indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri

Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* Atas Laporan Kinerja, baik dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Bidang Pemasaran Kepariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan sesuai dengan tujuan atas program dan kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan lebih awal dimana mempunyai 2 (dua) indikator Kinerja yaitu Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri dan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata sesuai kebijakan prioritas yang didasarkan pada kemampuan anggaran daerah yang ada. Dengan anggaran Rp. 524.874.500 terealisasi sampai dengan Tribulan II 2025 sebesar Rp. 111.710.570 dengan capaian 21.28 %. Anggaran dan Realisasi serapan tersebut, sebagai berikut :

Sasaran / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
		Pagu	Realisasi	%	T	R	%	
Sub Kegiatan : Penguatan Promosi Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	a. Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik dalam dan luar negeri	95.586.750	38.080.000	39.84	2	1	50	
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata	b. Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	304.217.500	23.463.070	7.71	3	-	-	
Total Anggaran :		399.804.250	61.543.070	15 %				

Berikut adalah uraian capaian dari masing-masing indikator, sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota.

1. Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik dalam dan luar negeri

Media Promosi Pariwisata merupakan sarana dan prasarana sebagai penunjang promosi yang sangatlah perlu bagi perkembangan dan pemasaran pariwisata keluar daerah maupun *event* yang ada didalam daerah. Media Promosi cetak sebagai bahan memperkenalkan atau secara langsung memasarkan Kabupaten Lumajang khususnya Obyek Wisata dan apapun yang menyangkut Kepariwisataaan yang ada di Kabupaten Lumajang. Media Promosi yang digunakan adalah alat peraga dan media informasi obyek wisata yang di Kabupaten Lumajang.

1.1 Perjanjian Kinerja

- Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sub. Kegiatan Penguatan Promosi Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri Tahun 2025 sebesar **2 (dua) Promosi**, sampai dengan Tribulan II Tahun 2025 terealisasi sebesar **1 (satu) Promosi**. maka dalam hal ini belum berhasil dengan rata-rata capaian sebesar **50 %**.
- Berdasarkan Rencana Aksi Sub. Kegiatan Penguatan Promosi Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri Tribulan II Tahun 2025 memiliki target sebesar **0 (-) Promosi** dan terealisasi Tribulan II Tahun 2025 sebanyak **0 (-) Promosi**, maka dalam hal ini belum bisa diukur. dengan rata-rata capaian sebesar **- %**.

Tabel Cetak Materi Promosi Tahun 2025

Tribulan I	Pembuatan Konten Vidio Pendek DTW dan Kuliner
Tribulan II	
Tribulan III	
Tribulan IV	

Tabel 1.1
Pencapaian Kinerja
s.d Tribulan II Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan	100 %	50 %	50 %
	a. Penguatan Promosi Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	2	1	

1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun lalu

Pada Tahun 2024 Tribulan II Jumlah jenis media promosi yang dibuat adalah nol atau belum melakukan pembuatan media promosi dikarenakan pada Tribulan II Tahun 2024 menyesuaikan *Team Schedule* yang telah dibuat, sedangkan dibandingkan Tribulan I Tahun 2025 mempunyai Target 0 Media promosi dan pada Tribulan II Terealisasi 1 Promosi dengan melakukan Pembuatan Konten Vidio Pendek yang menjadi Materi Promosi di Media Sosial Dinas Pariwisata

Tabel 1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja
s.d Tribulan II Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan	100 %	-	-		50 %
	a. Penguatan Promosi Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	2	-	-	-	1

1.3 Perencanaan Strategis

Berdasarkan Perencanaan Strategis Tahun 2025 sebesar 2 (dua) Promosi, dan sampai dengan Tribulan II Tahun 2025 terealisasi sebesar 1 (satu) promosi, maka dalam hal ini Belum berhasil dengan capaian rata-rata 50 %.

Tabel 1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan	100 %	50 %	50 %
	Penguatan Promosi Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	2	1	50 %

1.4 Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Standar Nasional

Untuk pengukuran standar nasional pada indikator ini tidak ada.

Tabel 1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Th. 2025	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
Meningkatnya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan	50 %	-	-
	Penguatan Promosi Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	1	-	-

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

2. Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri

Pembangunan pariwisata di Kabupaten Lumajang terkait segi pemasaran, diperlukan strategi yang baik dan sesuai kebutuhan. Salah satu bentuknya adalah melalui promosi kepariwisataan yang patut dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, dengan melaksanakan penyelenggaraan / dukungan event. Tidak hanya kegiatan event yang dilakukan oleh pihak Pemerintah, melainkan Pemerintah sudah memfasilitasi bentuk apapun melalui Dinas terkait yang sudah disediakan wadah bagi para Seniman atau yang lainnya.

2.1 Perjanjian Kinerja

- Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sub. Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten / Kota Tahun 2025 memiliki target sebesar 3 (tiga) Kegiatan, sampai dengan Tribulan II Tahun 2025 terealisasi sebesar 0 (nol) kegiatan, maka dalam hal ini belum berhasil dengan rata-rata capaian sebesar - %.
- Berdasarkan Rencana Aksi Sub. Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri pada Tribulan II Tahun 2025 memiliki target sebesar 0 (nol) kegiatan dan Tribulan II Tahun 2025 terealisasi sebesar 0 (nol) kegiatan, maka dalam hal ini belum terlaksana dengan rata-rata capaian sebesar 100 %.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja
s.d Tribulan II Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan	100 %	50 %	50 %
	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata	3	-	-

2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun lalu

Pada Tahun 2024 Seksi Promosi Kepariwisata Indikator Kinerja tersebut melakukan kegiatan event/ penyelenggaraan dan mengikuti pameran wisata. Sedangkan pada tahun 2025 pada Tribulan I melakukan penyusunan Kalender Event melalui *Desk* Kalender yang sudah dikirimkan oleh Instansi di Kabupaten Lumajang. Jadi untuk Tahun 2024 dan 2025 belum bisa dibandingkan dari segi Kinerjanya.

Tabel 2.2
Perbandingan Realisasi Kinerja
s.d Tribulan II Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan	100	-	-	-	50 %
	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata	3	-	-	-	-

2.3 Perencanaan Strategis

Berdasarkan Perencanaan Tahun 2025 memiliki target sebesar **3 (tiga) Kegiatan**, sampai dengan Tribulan II Tahun 2025 terealisasi sebesar **0 (nol) Kegiatan**, maka dalam hal ini belum terlaksana dengan rata-rata capaian sebesar - %.

Tabel 2.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan	100 %	50 %	50 %
	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata	3	-	-

2.4 Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Standar Nasional

Untuk pengukuran standar nasional pada indikator ini tidak ada.

Tabel 2.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Th. 2025	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
Meningkatnya Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten /Kota	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan	50 %	-	-
	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten / Kota	-		

A. Rencana Tindak Lanjut.

Tindak lanjut dan upaya dalam program kerja tahun 2025 adalah Melanjutkan dan mempertahankan capaian kegiatan yang sudah ada dan sebisa mungkin meningkatkan kinerja dan hasil yang dicapai.

B. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

☐ Laporan kurang baik

☒ Laporan sudah baik

☐ Laporan diperbaiki

☐ Target dan realisasi diteliti ulang

☐ Capaian diteliti ulang

☐ Lain-lain

.....
.....
.....
.....
.....

BAB IV

PENUTUP

Laporan Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda sampai dengan Tribulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang nomor 188.45/494/427.12/2022 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Pariwisata, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan dari 2 (dua) target yang ditetapkan dengan 2 (dua) sasaran strategis sudah sangat berhasil diwujudkan dengan baik.

Mengetahui,

**ATASAN LANGSUNG
KEPALA BIDANG PEMASARAN**

YULI ANNISA H. SST.Par
NIP. 19810712 201001 2 024

Lumajang, 3 Juli 2025

**ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN
EKONOMI KREATIF AHLI MUDA**


TOMY ERNAWATI, S.Sos., MM
NIP. 19771018 201101 2 004

LAPORAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA
s.d Tribunal II

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja tersebut.

Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda merupakan salah satu Sub Koordinator Kegiatan pada Bidang Pemasaran Kepariwisata yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang nomor 188.45/494/427.12/2022 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Pariwisata, mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menyusun profil industri;
- b. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. Melakukan analisis profil industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkelanjutan;
- d. Menyusun standar kompetensi jenis pekerjaan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah diidentifikasi;
- e. Menyusun kriteria program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif;
- f. Menyusun bahan terkait seleksi penyelenggaraan program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif;
- g. Menyusun bahan verifikasi lapangan penyelenggaraan program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif;
- h. Menyusun telaah potensi Ekonomi Kreatif pada kabupaten/kota;
- i. Menyusun usulan rencana kerja bidang kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- j. Menyusun deskripsi produk indikasi geografis sektor Ekonomi Kreatif;
- k. Melakukan identifikasi bahan komersialisasi perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
- l. Melakukan pendampingan transformasi digital pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda mempunyai peran penting dalam mendukung keberhasilan sasaran strategis Bidang Pemasaran Kepariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang serta dalam mengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi beserta pencapaiannya Pemerintah (SAKIP).

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

1.1 Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditanda tangani antara Kepala Bidang Pemasaran Kepariwisata Sub. Koordinator Kegiatan adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan **2 (dua)** target kinerja dengan **2 (dua)** sasaran kegiatan yaitu :

1. Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri Jumlah kerjasama yang akan dilaksanakan dengan Stakeholder
 - Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
2. Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1.2 Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja tersebut sampai dengan Tribulan II Tahun 2025.

Tabel 1.2
Capaian Indikator Kinerja Individu
s.d Tribulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan	100 %	50 %	50 %
Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	-	-
Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	-	-

Tabel 1.2.1
Cost Per Outcome
s.d Tribulan II Tahun 2025

No	Sasaran / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	%	T	R	%	
1.	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan				100	50	50	
	Keg : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota		524.874.500	111.710.570	21				

1.3 Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Atas capaian target kinerja masing-masing indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, baik dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Bidang Pemasaran Kepariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan sesuai dengan tujuan atas program dan kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan lebih awal dimana Sub. Koordinator Kegiatan mempunyai dua sasaran kegiatan dengan 2 indikator kinerja diantaranya : Peningkatnya Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri dan Meningkatnya monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata. Dengan anggaran Rp. 524.874.500 terealisasi sampai dengan Triwulan II 2025 sebesar Rp. 111.710.570 dengan capaian 6.15 %. Anggaran dan Realisasi serapan sebagai berikut :

Sasaran / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
		Pagu	Realisasi	%	T	R	%	
Sub Kegiatan : Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	51.400.750	20.898.000	40.6	2	-	-	
Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.240.000	-	-	1	-	-	
Total Anggaran :		52.640.750	20.898.000					

Berikut adalah uraian capaian dari masing-masing indikator, sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota.

1. Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

Dalam perkembangan pada sektor pariwisata perlu adanya kerjasama dengan Stakeholder atau pelaku wisata untuk mempermudah cara memasarkan potensi wisata di Kabupaten Lumajang. Bentuk Kerjasama bisa dilakukan melalui Terbitan Majalah, Berita di Media Sosial terkait Potensi Wisata dll. Stakeholder atau Pelaku wisata sangat berpengaruh terhadap perkembangan sektor di bidang pariwisata. Semua Sektor Stakeholder mendorong perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata.

1.1 Perjanjian Kinerja

- Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki target sebesar **2 (dua) Dokumen**, sampai dengan Tribulan II Tahun 2025 terealisasi **0 (nol) Dokumen**, maka dalam hal ini **Belum Terlaksana** dengan rata-rata capaian sebesar **- %**.
- Berdasarkan Rencana Aksi pada Tribulan II Tahun 2025 memiliki target sebesar **- (-) Dokumen** pada Tribulan II Tahun 2025 terealisasi **0 (nol) Dokumen**, maka dalam hal ini **Belum Terlaksana** dengan rata-rata capaian sebesar **- %**.

Tabel Kerjsama

s.d Tribulan II Tahun 2025

Tribulan I	Tribulan II	Tribulan III	Tribulan IV
	√ (Kerjasama dengan Djalalin.com		

Tabel LI

Pencapaian Kinerja

s.d Tribulan II Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan	100 %	50 %	50 %
	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2	-	-

1.2 Realisasi Kinerja dengan tahun lalu

Pada Tahun 2024 mempunyai Target sebesar 2 Dokumen. Sedangkan Tahun 2025 mempunyai Target sebesar 3 Dokumen dan sampai dengan Tribulan II Terealisasi sebesar 0 Dokumen dikarenakan melakukan kerjasama sesuai dengan team schedule yang telah disusun.

Tabel 1.2

Perbandingan Realisasi Kinerja

s.d Tribulan II Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan	100 %	-	-	-	50 %
	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2	-	-	-	-

1.3 Perencanaan Strategis

Berdasarkan Perencanaan Strategis Tahun 2024 memiliki target sebesar **2 (dua) Dokumen**, sampai dengan Tribulan II Tahun 2025 belum terealisasi sebesar **(-) Dokumen**, maka dalam hal ini **belum berhasil** dengan rata-rata capaian sebesar **- %**.

Tabel 1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan	100 %	50 %	50 %
	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2	-	-

1.4 Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Standar Nasional

Untuk pengukuran standar nasional pada indikator ini tidak ada.

Tabel 1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Th. 2025	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan	50 %	-	-
	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	-	-	-

SASARAN STRATEGIS:
Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2. Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2.1 Perjanjian Kinerja

- Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki target sebesar **1 (satu) Dokumen**, sampai dengan Tribulan II Tahun 2025 terealisasi - (-) **Dokumen**, maka dalam hal ini **Belum Berhasil** dengan rata-rata capaian sebesar - %.
- Berdasarkan Rencana Aksi pada Tribulan II Tahun 2025 memiliki target sebesar **1 (satu) Dokumen** pada Tribulan II Tahun 2025 terealisasi **1 (satu) Dokumen**, maka dalam hal ini **Berhasil** dengan rata-rata capaian sebesar 100 %.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja
s.d Tribulan II Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan	100 %	50 %	50 %
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1	-	-

2.2 Realisasi Kinerja dengan tahun lalu

Tahun 2024 Sub. Kegiatan monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata tidak terealisasi, sedangkan Tribulan II tahun 2025 untuk kegiatan tersebut belum dilaksanakan dikarenakan sesuai dengan team schedule yang telah disusun.

Tabel 2.2
Perbandingan Realisasi Kinerja
s.d Tribulan II Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan	100 %	-	-	-	50 %
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1	-	-	-	-

2.3 Perencanaan Strategis

Berdasarkan Perencanaan Strategis Tahun 2025 memiliki target sebesar 1 (satu) **Dokumen**, sampai dengan Tribulan II Tahun 2025 terealisasi sebesar - (-) **Dokumen**, maka dalam hal ini **belum berhasil** dengan rata-rata capaian sebesar - %.

Tabel 2.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan	100 %	50 %	50 %
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1	-	-

2.4 Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Standar Nasional

Untuk pengukuran standar nasional pada indikator ini tidak ada.

Tabel 2.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Th. 2025	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan	50 %	-	-
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-	-	-

A. Rencana Tindak Lanjut.

Tindak lanjut dan upaya dalam program kerja Tahun 2025 adalah Melanjutkan dan mempertahankan capaian kegiatan yang sudah ada dan meningkatkan kinerja agar pelayanan di bidang pariwisata sangat memuaskan dan legal.

B. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

BAB IV

PENUTUP

Laporan Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda sampai dengan Tribulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

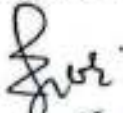
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang nomor 188.45/494/427.12/2022 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Pariwisata, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan dari 2 (dua) target yang ditetapkan dengan 2 (dua) sasaran strategis sudah cukup berhasil diwujudkan dengan baik.

Mengetahui,

Lumajang, 3 Juli 2025

ATASAN LANGSUNG
KEPALA BIDANG PEMASARAN KEPARIWISATAAN

ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN
EKONOMI KREATIF AHLI MUDA


YULI ANNISA H, SST.Par
NIP. 19810712 201001 2 024


TOMY ERNAWATI, S.Sos., MM
NIP. 19771018 201101 2 004

LAPORAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA
s.d Tribulan II

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut.

Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda merupakan salah satu Sub Koordinator Kegiatan pada Bidang Pemasaran Kepariwisata yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang nomor 188.45/494/427.12/2022 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Pariwisata, mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Menyusun profil industri;
- b. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. Melakukan analisis profil industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkelanjutan;
- d. Menyusun standar kompetensi jenis pekerjaan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah diidentifikasi;
- e. Menyusun kriteria program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif;
- f. Menyusun bahan terkait seleksi penyelenggaraan program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif;
- g. Menyusun bahan verifikasi lapangan penyelenggaraan program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif;
- h. Menyusun telaah potensi Ekonomi Kreatif pada kabupaten/kota;
- i. Menyusun usulan rencana kerja bidang kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- j. Menyusun deskripsi produk indikasi geografis sektor Ekonomi Kreatif;
- k. Melakukan identifikasi bahan komersialisasi perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
- l. Melakukan pendampingan transformasi digital pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda mempunyai peran penting dalam mendukung keberhasilan sasaran strategis Bidang Pemasaran Kepariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang serta dalam mengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi beserta pencapaiannya Pemerintah (SAKIP).

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Pemasaran Kepariwisata dengan Sub. Koordinator Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota baik Dalam dan Luar Negeri adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 1 (satu) target kinerja dengan 1 (satu) sasaran kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota baik Dalam dan Luar Negeri
 - Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri

2.2 Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja tersebut sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Individu
s.d Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/5
Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan	100 %	50 %	50 %
Meningkatnya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota baik Dalam dan Luar Negeri	4 Dok	-	-

Tabel 2.2
Cost Per Outcome
s.d Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	%	T	R	%	
1	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan				100	50	50	
	Keg : Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota		524.874.500	111.710.570	21.28				

2.3 Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Atas capaian target kinerja masing-masing indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS:
Meningkatnya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kab/ Kota, Baik dalam dan Luar Negeri

Bahwa dunia pariwisata adalah menjadi salah satu bidang garapan pemerintah dalam implementasi egovernment untuk mempublikasikan atau memasarkan potensi wisata. Berbasis TI (Teknologi Informasi) dalam hal ini berarti adanya suatu Sistem Informasi Manajemen yang berbasis pada pengolahan data elektronik. Teknologi informasi yang sangat bermanfaat adalah pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pariwisata. Dengan keberadaan SIM Pariwisata ini akan dapat juga dibuat Sistem Pendukung Keputusan Pariwisata.

Sistem Informasi Manajemen Pariwisata ditujukan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan cara penyiapan, penyusunan dan penyimpanan data yang tepat sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Untuk membangun Sistem Informasi ini dibutuhkan kerjasama yang erat antara ahli Teknologi Informasi dan ahli Pariwisata karena masing-masing pihak memiliki kepentingan yang sangat besar dalam keberhasilan sistem yang akan dibangun.

Bila pemilahan data kurang tepat maka hasil yang diperoleh juga tidak optimal Selain itu pengumpulan data pariwisata membutuhkan biaya yang tinggi, seperti kebutuhan survey yang bersifat primer maupun sekunder. Banyak tampilan data kepariwisataan yang sudah tersedia saat ini, namun masih kurang bermanfaat bagi wisatawan, karena yang ditampilkan, terlalu umum atau bahkan kurang akurat. Untuk itu perlu dipetakan kebutuhan data yang diperlukan oleh wisatawan yang jenisnya juga beragam untuk menentukan "isi" dari struktur datanya. Dengan anggaran **Rp. 524.874.500** dan terealisasi sampai dengan Triwulan II 2025 sebesar **Rp. 111.710.570** dengan capaian **21.28 %**. Anggaran dan Realisasi serapan tersebut terdiri dari :

Sasaran / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
		Pagu	Realisasi	%	T	R	%	
Sub Kegiatan : Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/ kota baik dalam dan luar negeri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/ kota baik dalam dan luar negeri	72.429.500	29.269.500	40	4	0	0	
Total Anggaran :		72.429.500	29.269.500	40				

Berikut adalah uraian capaian dari masing-masing indikator, sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota

1. Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/ kota baik dalam dan luar negeri

Sejalan dengan keinginan Pemerintah untuk memajukan industri pariwisata maka tentunya ada keinginan besar untuk mnegrade informasi data pariwisata sebaik-baiknya agar wisatawan yang membutuhkan dapat memperoleh dengan cepat, akurat dan disebarluaskan dengan mudah. Pembangunan pariwisata di Kabupaten Lumajang terkait bahan perkembangan dan sebagai bahan pengambilan keputusan guna meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan banyaknya orang yang berkunjung ke Lumajang khususnya di Obyek Wisata yang ada di Kabupaten Lumajang. Salah satu bentuknya adalah mendata kunjungan wisata yang di obyek wisata dan mendata kunjungan akomodasi khususnya di bidang perhotelan. Tidak hanya melakukan pendataan itu saja melainkan Data perkembangan akomodasi, data Seni dan Budaya dan Data Ekonomi Kreatif yang sekarang ini di Lumajang sudah mulai ramai bermunculan. Berbagai Wisatawan sangat memerlukan Data yang terbaru/ terupdate guna untuk mengetahui informasi kepariwisataan yang ada di Kabupaten Lumajang.

1.1 Perjanjian Kinerja

- Berdasarkan Perjanjian Kinerja **Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/ kota baik dalam dan luar negeri** Pada Tahun 2025 memiliki target sebesar **4 (empat) Dokumen**, sampai dengan Tribulan II Terealisasi sebesar **0 (nol) Dokumen**, maka dalam hal ini **berhasil** dengan rata-rata capaian sebesar **- %**. Dikarenakan Dokumen yang dihasilkan tersusun pada periode akhir atau Tribulan IV Tahun 2025.
- Berdasarkan Rencana Aksi **Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/ kota baik dalam dan luar negeri** pada Tribulan II Tahun 2025 memiliki target sebesar **0 (-) Dokumen** dan Tribulan II Tahun 2025 terealisasi sebesar **0 (-) Dokumen**, maka dalam hal ini **belum terlaksana** dengan rata-rata capaian sebesar **- %**.

Tabel 1.1
Pencapaian Kinerja
s.d Tribulan II Tahun 2025

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Capaian (5=4/3)
Meningkatnya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan	100 %	50 %	50 %
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota Baik dalam dan Luar Negeri	4	-	-

1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun lalu

Pada Tahun 2024 mempunyai Target 6 Dokumen dan Terealisasi pada akhir Tahun 2024 dikarenakan semua dokumen disusun sesuai dengan *team schedule*, sedangkan pada tahun 2025 mempunyai Target sebesar 4 dokumen yang tersusun pada periode akhir atau Tribulan II Tahun 2025.

Tabel 1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja
s.d Tribulan II Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Meningkatnya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota Baik dalam dan Luar Negeri	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan	100	-	-	-	50 %
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota Baik dalam dan Luar Negeri	4	-	-	-	-

1.3 Perencanaan Strategis

Berdasarkan Perencanaan Strategis Tahun 2025 sebesar **4 (empat)** Dokumen, sampai dengan Tribulan II Tahun 2025 terealisasi sebesar **- (-) Dokumen**, maka dalam hal ini **Belum berhasil** dengan capaian rata-rata **- %**.

Tabel 1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota Baik dalam dan Luar Negeri	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan	100 %	50 %	50 %
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota Baik dalam dan Luar Negeri	4	-	-

1.4 Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Standar Nasional

Untuk pengukuran standar nasional pada indikator ini tidak ada.

Tabel 1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Th. 2025	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
Meningkatnya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota Baik dalam dan Luar Negeri	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dipasarkan	50 %	-	-
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota Baik dalam dan Luar Negeri	0	-	-

A. Rencana Tindak Lanjut.

Tindak lanjut dan upaya dalam program kerja Tahun 2025 adalah Melanjutkan dan mempertahankan informasi dan publikasi kepariwisataan melalui media sosial dan lebih meningkatkan publikasi-publikasi kepariwisataan. Serta dapat mengevaluasi pengelola obyek wisata agar melaporkan data kunjungan wisata di obyek wisata masing-masing dan lebih tepat waktu untuk penginputannya.

B. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

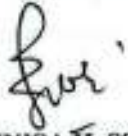
- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

**BAB IV
PENUTUP**

Laporan Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda sampai dengan Tribulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang nomor 188.45/494/427.12/2022 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Pariwisata, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan dari 1 (satu) target yang ditetapkan dengan 1 (satu) sasaran strategis sudah sangat berhasil diwujudkan dengan baik.

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG
KEPALA BIDANG PEMASARAN


YULI ANNISA H, SST.Par
NIP. 19810712 201001 2 024

Lumajang, 3 Juli 2025

ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN
EKONOMI KREATIF AHLI MUDA


TOMY ERNAWATI, S.Sos.,MM
NIP. 19771018 201101 2 004

**LAPORAN KINERJA ESELON III
BIDANG EKONOMI KREATIF
Tribulan II**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tribulan II Tahun 2025 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Ekonomi Kreatif.

Bidang Ekonomi Kreatif merupakan salah satu Bagian yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 69 Tahun 2016 tentang perubahan SOTK dan penjabaran tugas, pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2016, Bidang Ekonomi Kreatif tugas Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi Dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif Di Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sdm Pariwisata Dan Kelembagaan Dan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sdm Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program bidang Ekonomi Kreatif berbasis seni, budaya, media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan fasilitasi sumbu daya alam, manusia dan budaya;
- b. Pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan kebijakan, penetapan dan pedoman pelaksanaan bidang ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan fasilitasi sumber daya alam, manusia dan budaya;

- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam mengembangkan aktifitas ekonomi kreatif;
- d. Pelaksanaan sarana prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, promosi dan interaktif bagi insan kreatif lokal;
- e. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas sumber daya dan kelembagaan ekonomi kreatif;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Struktur Organisasi Bidang Ekonomi Kreatif terdiri dari:

- a. Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif;
- b. Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata;
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif;

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai peran penting dalam mendukung keberhasilan sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang serta dalam mengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi beserta pencapaiannya Pemerintah (SAKIP).

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tribulan II Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang dengan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 2 (dua) target 2 (dua) sasaran yaitu: 1.) Meningkatnya Penyediaan Prasarana di Daerah Kabupaten/Kota 2.) Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan sampai dengan Tribulan II tahun 2025 :

Tabel 1.1
Persentase Capaian Indikator Kinerja Individu Bidang Ekonomi Kreatif
(Tribulan II 2025)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Meningkatnya Usaha Ekonomi Kreatif	Jumlah usaha ekonomi kreatif yang berkembang	64 unit	17	26,56	
Meningkatnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi	100 orang	0	0	

Tabel 2.1
Persentase Capaian Kinerja Bidang Ekonomi Kreatif
(Tribulan II 2025)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Meningkatnya Penyediaan Prasarana di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah zona kreatif yang berkembang	1	0	0	
Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang berkembang	350	150	42,86	

Tabel 2.2
Cost per outcome Bidang Ekonomi Kreatif
(Tribulan II Tahun 2024)

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	%	T	R	%	
1	Meningkatnya Penyediaan Prasarana di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah zona kreatif yang berkembang	1.312.594.000	24.500.000	1,87	1	0	0	
	Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang berkembang	1.246.135.000	85.950.000	6,90	350	150	42,86	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS:

Meningkatnya Penyediaan Prasarana di Daerah Kabupaten/Kota,
Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar

Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan Peningkatan Jumlah zona kreatif yang berkembang dan Peningkatan SDM Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja, baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang melalui Bidang Ekonomi Kreatif dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan fasilitasi, pembinaan dan bimbingan, baik secara kolektif maupun yang bersifat khusus guna Meningkatkan Penyediaan Prasarana di Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp.

1.312.594.000 dan terealisasi pada Tribulan II Rp. 24.500.000 dengan capaian 1,87%, Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar dengan pagu anggaran Rp. 1.246.350.000 dan terealisasi pada Tribulan II Rp. 85.950.000 dengan capaian 6,90%.

Berikut adalah uraian capaian dari masing-masing indikator, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyediaan Prasarana di Daerah Kabupaten/Kota

Pada awal tahun 2017 pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang terdapat bidang baru yaitu Bidang Ekonomi Kreatif. Bidang Ekonomi Kreatif memiliki beberapa zona kreatif di Kabupaten Lumajang yang harus dikembangkan. Berikut capaian kinerja jika dianalisis dari:

1.1 Perjanjian Kinerja

- Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dengan Kepala Bidang Dinas Pariwisata Lumajang memiliki target sebesar 1 zona yang dikembangkan dan terealisasi sebesar 0 zona. Maka dalam hal ini kategori capaian sebesar 0 %.

Tabel 1.1.1.
Pencapaian Kinerja
Tribulan II Tahun 2025

Sasaran Strategis (1)	Indikator (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Capaian (5=4/3)
Meningkatnya Penyediaan Prasarana di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah zona kreatif yang berkembang	1 zona	0 zona	0 %

- Berdasarkan Rencana Aksi hanya pada Tribulan II Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dengan Kepala Bidang Dinas Pariwisata Lumajang memiliki target sebesar 1 zona yang dikembangkan dan terealisasi sebesar 0 zona. Maka dalam hal ini kategori capaian sebesar 0 %

Tabel 1.1.2.
Pencapaian Kinerja
Pada Tribulan II tahun 2025

Sasaran Strategis (1)	Indikator (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Capaian (5=4/3)
Meningkatnya Penyediaan Prasarana di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah zona kreatif yang berkembang	1 zona	0 zona	0 %

1.2 Realisasi dengan Tahun Lalu

Sasaran dan indikator kinerja ini baru dibuat pada akhir tahun 2023 dan dilaksanakan tahun 2024, dalam hal ini tidak ada perubahan realisasi kinerja dengan tahun 2025.

Tabel 1.2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja
Tribulan II Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Th. 2023	Th. 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Penyediaan Prasarana di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah zona kreatif yang berkembang	1 zona	1 zona	1 zona

1.3 Perencanaan Strategis

Berdasarkan Perencanaan Strategis Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dengan Kepala Bidang Dinas Pariwisata Lumajang memiliki target sebesar 1 zona yang dikembangkan dan terealisasi sebesar 0 zona. Maka dalam hal ini kategori capaian sebesar 0 %.

Tabel 1.3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Penyediaan Prasarana di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah zona kreatif yang berkembang	1 zona	0 zona	0 %

1.4 Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Standar Nasional

Tidak ada perbandingan dengan realisasi kinerja standar nasional.

Tabel 1.4.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Th. 2025	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Penyediaan Prasarana di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah zona kreatif yang berkembang	0 zona	-	-

2. Jumlah Pelaku SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang berkembang

Pada awal tahun 2017 pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang terdapat bidang baru yaitu Bidang Ekonomi Kreatif. Pelaku SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar sesuai perkembangan zaman, dalam hal ini pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi prioritas agar perekonomian mereka. Berikut capaian kinerja jika dianalisis dari :

2.1 Perjanjian Kinerja

- Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dengan Kepala Dinas Pariwisata memiliki target sebesar 350 orang dan terealisasi sampai dengan Tribulan II yaitu 150 orang. Maka dalam hal ini kategori capaian kinerja belum Berhasil dengan capaian sebesar 42,86 %.

Tabel 3.1.1.
Pencapaian Kinerja
Tribulan II Tahun 2025

Sasaran Strategis (1)	Indikator (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Capaian (5=4/3)
Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang berkembang	350 orang	150 orang	42,86

- Berdasarkan Rencana Aksi hanya pada Tribulan II Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dengan Kepala Dinas Pariwisata memiliki target sebesar 150 orang dan terealisasi sampai dengan Tribulan II yaitu 150 orang. Maka dalam hal ini kategori capaian kinerja belum Berhasil dengan rata-rata capaian sebesar 100 %.

Tabel 3.1.2.
Pencapaian Kinerja
Tribulan II Tahun 2025

Sasaran Strategis (1)	Indikator (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Capaian (5=4/3)
Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang berkembang	150	150	100

2.2 Realisasi dengan Tahun Lalu

Sasaran dan indikator kinerja ini baru dibuat pada akhir tahun 2024 dan dilaksanakan tahun 2025,

Tabel 3.2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tribulan II Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Th. 2024	Th. 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang berkembang	350 orang	125 orang	150 orang

2.3 Perencanaan Strategis

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dengan Kepala Dinas Pariwisata memiliki target sebesar 350 orang dan terealisasi sampai dengan Tribulan II yaitu 150 orang. Maka dalam hal ini kategori capaian kinerja belum Berhasil dengan rata-rata capaian sebesar 42,86 %.

Tabel 3.3.1.
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang berkembang	350 orang	150 orang	42,86 %

2.4 Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Standart Nasional

Tidak ada perbandingan dengan realisasi kinerja standar nasional.

Tabel 3.4.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Th. 2025	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang berkembang	150 orang	-	-

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk meningkatkan pengembangan Ekonomi Kreatif kepada kelompok masyarakat yang telah mendapat pelatihan diperlukan pembinaan dan bimbingan berkelanjutan yang meliputi pengembangan kelembagaan, peningkatan ketrampilan lanjutan, peningkatan design produk dan pemasaran. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan semangat mereka dalam memperbaiki dan mengembangkan diri serta meningkatkan pendapatan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

.....

.....

.....

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Ekonomi Kreatif berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2016, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, terdapat 2 (dua) target 2 (dua) sasaran yaitu: 1.) Meningkatnya Penyediaan Prasarana di Daerah Kabupaten/Kota. 2.) Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Lumajang, 03 Juli 2025

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN LUMAJANG


YULI HARISMA WATI, SP. M.Ling
NIP. 19690703 199602 2 002

KEPALA BIDANG
EKONOMI KREATIF


LUQMAN AFIFUDIN, S.KM, M.P.H.
NIP. 19810516 200604 1 014

**LAPORAN KINERJA ESELON IV
SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Tribulan II**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja sampai dengan Tribulan II Tahun 2025 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Ekonomi Kreatif.

Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata merupakan salah satu bagian di Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 69 Tahun 2016 tentang perubahan SOTK dan penjabaran tugas, pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2016, Bidang Ekonomi Kreatif tugas Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan ekonomi Kreatif, sarana prasarana ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya dan kelembagaan ekonomi kreatif. Sesuai TUPOKSI Bidang Ekonomi Kreatif, seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis peningkatan kapasitas sumber daya dan kelembagaan di bidang pariwisata.

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan kapasitas sumber daya dan kelembagaan di bidang pariwisata.
- c. Pembinaan pelaksana otoritas pariwisata.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise peningkatan kapasitas sumber daya dan kelembagaan di bidang pariwisata.
- e. Pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan peningkatan kapasitas sumber daya kelembagaan di bidang pariwisata.
- f. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan atasan.

Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai peran penting dalam mendukung keberhasilan sasaran strategis Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang serta dalam mengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi beserta pencapaiannya Pemerintah (SAKIP).

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tribulan II Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dengan Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 2 (dua) Target Kinerja dengan 2 (dua) Sasaran yaitu: 1) Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. 2) Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berkembang kapasitasnya.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan sampai dengan Tribulan II tahun 2025 :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Tribulan II Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar yang ditingkatkan kapasitasnya	150 orang	150 orang	100 %	
Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berkembang kapasitasnya	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berkembang kapasitasnya	200 orang	0 orang	0 %	

Tabel 2.2
Cost per outcome Tribulan II Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
 Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	%	T	R	%	
1.1	Tertaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar yang ditingkatkan kapasitasnya	967.275.000	51.450.000	5,32	150	150	100	
	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berkembang kapasitasnya	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berkembang kapasitasnya	278.860.000	34.500.000	12,37	200	0	0	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS:

Tertaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, Meningkatnya
 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja, baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang melalui Bidang Ekonomi Kreatif dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan fasilitasi, pembinaan dan bimbingan, baik secara kolektif

maupun yang bersifat khusus guna meningkatkan jumlah data pelaku dan potensi industri ekonomi kreatif. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan pagu anggaran Rp 967.275.000 dan terealisasi Rp. 51.450.000 dengan capaian 5,32 %, Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berkembang kapasitasnya dengan pagu anggaran Rp 278.860.000 dan terealisasi Rp. 34.500.000 dengan capaian 12,37 %. Berikut adalah uraian capaian dari indikator, sebagai berikut:

1. Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar yang ditingkatkan kapasitasnya

Pada awal tahun 2017 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang terdapat bidang baru yaitu Bidang Ekonomi Kreatif. Bidang Ekonomi Kreatif terdiri dari 16 Subsektor. Sampai dengan Tribulan II tahun 2025 telah dilaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan dari 16 subsektor. Berikut ini capaian kinerja jika dianalisis dari :

1.1. Perjanjian Kinerja

- Berdasarkan Perjanjian Kinerja sampai dengan Tribulan II tahun 2025 Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif memiliki target 150 Orang dan terealisasi 150 Orang. Maka dalam hal ini kategori capaian kinerja Berhasil dengan capaian sebesar 100%.

Tabel 1.1.1
Pencapaian Kinerja
Tribulan II Tahun 2025

Sasaran (1)	Indikator (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Capaian (5=4/3)
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar yang ditingkatkan kapasitasnya	150 orang	150 orang	100 %

- Berdasarkan Rencana Aksi pada Tribulan II tahun 2025 Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif memiliki target 150 Orang pelaku Ekonomi Kreatif dan terealisasi 150 Orang pelaku Ekonomi Kreatif. Maka dalam hal ini kategori capaian kinerja berhasil dengan capaian sebesar 100%.

Tabel 1.1.1
Pencapaian Kinerja
Tribulan II Tahun 2025

Sasaran (1)	Indikator (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Capaian (5=4/3)
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar yang ditingkatkan kapasitasnya	150 orang	150 orang	100 %

1.2. Realisasi dengan Tahun Lalu

Bidang Ekonomi Kreatif mulai dibentuk tahun 2017, maka untuk perbandingan realisasi dengan tahun lalu dijelaskan dengan tabel dibawah ini.

Tabel 1.2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja
Tribulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan (2)	Target (3)	Realisasi		
			Th. 2023 (5)	Th. 2024 (6)	Th. 2025 (7)
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar yang ditingkatkan kapasitasnya	150 orang	25 orang	60 orang	150 orang

1.3. Perencanaan Strategis

- Berdasarkan Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025 Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif memiliki target 150 orang dan terealisasi 150 Orang. Maka dalam hal ini kategori capaian kinerja Berhasil dengan capaian sebesar 100 %.

Tabel 1.3.1

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar yang ditingkatkan kapasitasnya	150 orang	150 orang	100 %

1.4. Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Standar Nasional

Tidak ada perbandingan dengan realisasi kinerja standar nasional.

Tabel 1.4.1

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Th. 2025	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar yang ditingkatkan kapasitasnya	150 orang	-	-

2. Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berkembang kapasitasnya

Pada awal tahun 2017 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang terdapat bidang baru yaitu Bidang Ekonomi Kreatif. Bidang Ekonomi Kreatif terdiri dari 16 Subsektor. Sampai dengan Tribulan II tahun 2025 telah dilaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan dari 16 subsektor. Berikut ini capaian kinerja jika dianalisis dari :

2.1 Perjanjian Kinerja

- Berdasarkan Perjanjian Kinerja sampai dengan Tribulan II tahun 2025 Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif memiliki target 200 Orang dan terealisasi 0 Orang. Maka dalam hal ini kategori capaian kinerja belum Berhasil dengan capaian sebesar 0 %.

Tabel 2.1.1
Pencapaian Kinerja
Tribulan II Tahun 2024

Sasaran (1)	Indikator (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Capaian (5=4/3)
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berkembang kapasitasnya	200 orang	0 orang	0 %

- Berdasarkan Rencana Aksi sampai dengan Tribulan II tahun 2025 Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif memiliki target 0 Orang pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina dan terealisasi 0 Orang pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina. Maka dalam hal ini kategori capaian kinerja Belum Berhasil dengan capaian sebesar 0%.

Tabel 2.1.2
Rencana Aksi
Tribulan II Tahun 2025

Sasaran (1)	Indikator (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Capaian (5=4/3)
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berkembang kapasitasnya	0 orang	0 orang	0 %

2.2 Realisasi dengan Tahun Lalu

Bidang Ekonomi Kreatif mulai dibentuk tahun 2017, maka untuk perbandingan realisasi dengan tahun lalu dijelaskan dengan tabel dibawah ini.

Tabel 2.2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja
Tribulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi		
			Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025
	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berkembang kapasitasnya	200 orang	200 orang	25 orang	0 orang

2.3 Perencanaan Strategis

- Berdasarkan Perjanjian Kinerja sampai dengan Tribulan II tahun 2025 Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif memiliki target 200 Orang pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina dan terealisasi 0 Orang pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina. Maka dalam hal ini kategori capaian kinerja belum Berhasil dengan capaian sebesar 0 %.

Tabel 2.3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berkembang kapasitasnya	200 orang	0 orang	0 %

2.4 Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Standar Nasional

Tidak ada perbandingan dengan realisasi kinerja standar nasional.

Tabel 2.4.1
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Th. 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berkembang kapasitasnya	0 orang	-	-

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada kelompok masyarakat yang telah mengikuti event diperlukan pemantauan, monitoring dan bimbingan berkelanjutan. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan semangat mereka dalam memperbaiki dan mengembangkan diri serta meningkatkan pendapatan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Ekonomi Kreatif berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2016, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata sesuai dengan TUPOKSI Bidang Ekonomi Kreatif.

Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, terdapat 2 (dua) Target Kinerja dengan 2 (dua) Sasaran yaitu: 1) Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. 2) Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

Lumajang, 03 Juli 2025

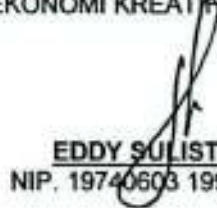
Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG

KEPALA BIDANG EKONOMI
KREATIF



LUQMAN AFIFUDIN, S.KM. M.P.H.
NIP. 19810516 200604 1 014

ADYTAMA KEPARIWISATAAN DAN
EKONOMI KREATIF AHLI MUDA



EDDY SULISTIJO
NIP. 19740603 199403 1 003

**LAPORAN KINERJA ESELON IV
SEKSI PENGELOLAAN SARANA PRASARANA EKONOMI
KREATIF
Tribulan II**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tribulan II Tahun 2025 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Ekonomi Kreatif.

Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif merupakan salah satu bagian di Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 69 Tahun 2016 tentang perubahan SOTK dan penjabaran tugas, pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor nomor 69 Tahun 2016, Bidang Ekonomi Kreatif tugas Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan ekonomi Kreatif, sarana prasarana ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya dan kelembagaan ekonomi kreatif. Sesuai TUPOKSI Bidang Ekonomi Kreatif, Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan sarana prasarana ekonomi kreatif.
- b. Melaksanakan pengelolaan dan peningkatan zona ekonomi kreatif.

- c. Melaksanakan pengelolaan sarana prasarana zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan inovasi produk ekonomi kreatif.
- d. Melaksanakan pembentukan wadah promosi dan inovasi produk ekonomi kreatif.
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan sarana prasarana ekonomi kreatif.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada kepala bidang.
- g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.

Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif mempunyai peran penting dalam mendukung keberhasilan sasaran strategis Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang serta dalam mengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi beserta pencapaiannya Pemerintah (SAKIP).

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tribulan II Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dengan Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 2 (dua) Target Kinerja dengan 2 (dua) Sasaran yaitu: 1.) Meningkatnya Zona Kreatif di daerah Kabupaten/Kota. 2.) Tersedianya ekosistem ekonomi kreatif yang berkembang

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan Tribulan II tahun 2025:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Tribulan II Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana
Bidang Ekonomi Kreatif

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Meningkatnya Zona Kreatif di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Zona Kreatif di daerah Kabupaten/Kota	1 ruang	0 ruang	0 %	
Tersedianya ekosistem ekonomi kreatif yang berkembang	Jumlah Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berkembang	2 ekosistem	0 ekosistem	0 %	

Tabel 2.2
Cost per outcome Tribulan II Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana
 Bidang Ekonomi Kreatif

No	Sasaran / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	%	T	R	%	
1	Meningkatnya Zona Kreatif di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Zona Kreatif di daerah Kabupaten/Kota	1.192.800.000	24.500.000	2,05	1	0	0	
2	Tersedianya ekosistem ekonomi kreatif yang berkembang	Jumlah Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berkembang	119.794.000	0	0	2	0	0	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS:

Meningkatnya Zona Kreatif di daerah Kabupaten/Kota
 Tersedianya ekosistem ekonomi kreatif yang berkembang

Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan Peningkatan Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang melalui Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif di Bidang Ekonomi Kreatif dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah

diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan fasilitasi, pembinaan dan bimbingan, baik secara kolektif maupun yang bersifat khusus guna Meningkatnya Zona Kreatif di daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp 1.192.800.000 dan tercapai Rp 24.500.000 capaian 2,05 %. Tersedianya ekosistem ekonomi kreatif yang berkembang dengan pagu anggaran Rp 119.974.000 dan tercapai Rp 0 capaian 0 %. Berikut adalah uraian capaian dari indikator, sebagai berikut:

1. Jumlah Zona Kreatif di daerah Kabupaten/Kota

Pada awal tahun 2017 pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang terdapat bidang baru yaitu Bidang Ekonomi Kreatif. Bidang Ekonomi Kreatif memiliki ruang kreatif yang harus difasilitasi. Berikut ini capaian kinerja jika dianalisis dari :

1.1. Perjanjian Kinerja

- Berdasarkan Perjanjian Kinerja sampai dengan Tribulan II Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif dengan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif memiliki target 1 ruang dan terealisasi 0 ruang. Maka dalam hal ini kategori capaian kinerja belum berhasil dengan capaian sebesar 0%.

Tabel 1.1.1
Pencapaian Kinerja
Tribulan II Tahun 2025

Sasaran (1)	Indikator (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Capaian (5=4/3)
Meningkatnya Zona Kreatif di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Zona Kreatif di daerah Kabupaten/Kota Kreatif	1 ruang	0 ruang	0 %

- Berdasarkan Rencana Aksi hanya pada Tribulan II Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif dengan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif memiliki target 1 ruang dan terealisasi 0 ruang. Maka dalam hal ini kategori capaian kinerja belum berhasil dengan capaian sebesar 0%.

Tabel 1.1.2
Pencapaian Kinerja
Tribulan II Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Zona Kreatif di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Zona Kreatif di daerah Kabupaten/Kota Kreatif	1 ruang	ruang	0 %

1.2. Realisasi dengan Tahun Lalu

Bidang Ekonomi Kreatif mulai dibentuk tahun 2017, akan tetapi sasaran dan indikator kegiatan masih baru maka untuk perbandingan realisasi dengan tahun lalu masih belum ada.

Tabel 1.2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja
Tribulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi		
			Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Zona Kreatif di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Zona Kreatif di daerah Kabupaten/Kota Kreatif	1 ruang	1 unit	4 unit	1 ruang

1.3. Perencanaan Strategis

Berdasarkan Perencanaan Strategis Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif dengan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif memiliki target 1 ruang dan terealisasi 0 ruang. Maka dalam hal ini kategori capaian kinerja belum berhasil dengan capaian sebesar 0%.

Tabel 1.3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Zona Kreatif di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Zona Kreatif di daerah Kabupaten/Kota Kreatif	1 ruang	0 ruang	0 %

1.4. Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Standar Nasional

Tidak ada perbandingan dengan realisasi kinerja standar nasional.

Tabel 1.4.1
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional
Tribulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Th. 2025	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Zona Kreatif di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Zona Kreatif di daerah Kabupaten/Kota Kreatif	0 ruang	-	-

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk meningkatkan pengembangan Ekonomi Kreatif kepada kelompok masyarakat yang telah mendapat pelatihan diperlukan pembinaan dan bimbingan berkelanjutan yang meliputi pengembangan kelembagaan, peningkatan ketrampilan lanjutan, peningkatan design produk dan pemasaran. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan semangat mereka dalam memperbaiki dan mengembangkan diri serta meningkatkan pendapatan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☐ Laporan kurang baik
 - ☒ Laporan sudah baik
 - ☐ Laporan diperbaiki
 - ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
 - ☐ Capaian diteliti ulang
 - ☐ Lain -lain
-
-
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

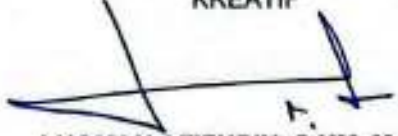
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Ekonomi Kreatif berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2016, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif sesuai dengan TUPOKSI Bidang Ekonomi Kreatif.

Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, terdapat 2 (dua) Target Kinerja dengan 2 (dua) Sasaran yaitu: 1) Meningkatnya Zona Kreatif di daerah Kabupaten/Kota. 2) Tersedianya ekosistem ekonomi kreatif yang berkembang

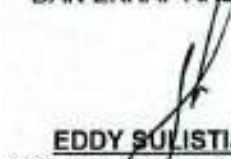
Lumajang, 03 Juli 2025

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG

KEPALA BIDANG EKONOMI
KREATIF


LUQMAN AFIFUDIN, S.KM, M.P.H.
NIP. 19810516 200604 1 014

ADYTAMA KEPARIWISATAAN
DAN EKRAF AHLI MUDA


EDDY SULISTIJO
NIP. 19740603 199403 1 003